

**PERAN *CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS*
DALAM PROSES PERDAMAIAN DI PATANI**

Tesis ini Diajukan Kepada Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sosial (M.Sos.)



Oleh :

Mr. Faisol Mamang
NIM : 1420311041

TESIS

**KONSENTRASI STUDI POLITIK DAN PEMERINTAHAN DALAM ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Mr. Faisol Mamang
NIM : 1420311041
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 November 2016

Saya Yang Menyatakan,



Mr. Faisol Mamang
NIM: 1420311041

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Mr. Faisol Mamang
NIM : 1420311041
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 November 2016

Saya Yang Menyatakan,



Mr. Faisol Mamang
NIM: 1420311041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PERAN *CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS* DALAM PROSES
PERDAMAIAN DI PATANI
Nama : Mr. Faisol Mamang
NIM : 1420311041
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam
Tanggal Ujian : 30 Januari 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sosial (M.Sos.)



Yogyakarta, 02 Februari 2017

Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERAN *CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS* DALAM PROSES
PERDAMAIAN DI PATANI

Nama : Mr. Faisol Mamang

NIM : 1420311041

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Najib Khailani, S.Fil., MA., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Prof. Noorhaidi, MA.,M.Phil, Ph.D.

Penguji : Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.



()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2017

Waktu : 10.00 – 11.00 wib.

Nilai Tesis/IPK. : 95/A+/3,63

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/~~Memuaskan~~

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu' alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

PERAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS DALAM PROSES PERDAMAIAN DI PATANI

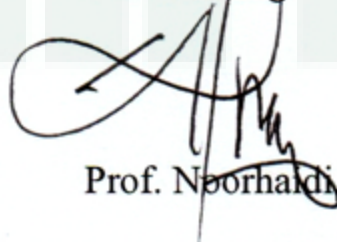
Yang ditulis oleh:

Nama : Mr. Faisol Mamang
NIM : 1420311041
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Sosial (M.Sos.)

Wassalamu' alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9 Desember 2016
Pembimbing



Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D

MOTTO

Landasan Motivasi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya tuhan tidak mengubah sesuatu nasib kaum bangsa
Melaikan kaum bangsa itu mengubah nasib mereka sendiri”*

(QS. Ar-ru'd, ayat : 11)¹

[*Right to Self-Determination of Patani People*]

¹ Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya, Surah *Ar-ru'd* :11.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Sujudku pada ar-Rahman ar-Rahim,
sebuah Naskah dari sepeinggal perjalanan hidup-ku*

Karya ini penulis persembahkan untuk:

*❖ Almamaterku tercinta
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

ABSTRAK

Peran *Civil Society Organizations* dalam Proses Perdamaian di Patani

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan *minority group* di Asia Tenggara masih menjadi masalah besar sejak dibentuk *nation-state* sehubungan dengan perubahan kultur, sosial, ekonomi, politik dalam globalisasi. Minoritas *Malay-Muslim* di Patani atau Thailand Selatan misalnya, hingga kini masih terus bergejolak konflik etnopolitik (*ethnopolitical conflict*) yang menuntut kemerdekaan yang disebabkan karena ketidakadilan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga menimbulkan konflik dan kekerasan yang berkelanjutan. Fenomena bangkitnya identitas nasional menjadi faktor penting yang berbasis pada etnis dan agama. Perbedaan itu diperkuat dengan identitas minoritas versus mayoritas dengan pemerintah pusat sebagai sentralistik kekuasaan.

Sejak negara nasional Thailand diproklamirkannya kemerdekaan itu, pasca revolusi Siam sehingga era transisi pemerintahan dengan sistem demokrasi monarki konstitusi, masyarakat *Malay-Muslim* di Patani yang merasa berbeda agama, etnis, dan klaim historis atas tanah menganggap bahwa pemerintah pusat tersebut adalah “semacam kolonial” yang sedang menawarkan perubahan atau modernisasi dengan identitas tunggal, yaitu identitas nasional Thailand (*Thai-ization* atau Siamisasi) yang berbeda dan menggerus identitas kultural yang mereka miliki. Perbedaan kepentingan politik antara nasional dan lokal dan identitas ini mendorong masyarakat minoritas itu melakukan pemberontakan melalui konflik dan bahkan kekerasan dengan revolusi bersenjata untuk pembebasan. Gerakan dengan menuntut merdeka wilayah tersebut sebagai “gerakan nasionalis (*nationalist movements*)”, yaitu suatu gerakan oleh kelompok minoritas atas dasar identitas politik berdasar kultural dan klaim kewilayahan tertentu atas pemerintah pusat karena merasa ditindas oleh kelompok mayoritas. Jika aspirasi itu tidak bisa dicari titik temu maka kekerasan adalah salah satu konsekuensinya, kemudian hak pertuanan menjadi legitimasi politik.

Beberapa dekade kebelakangi ini munculnya kelompok baru *social movement* yang berbentuk *Civil Society* yang mengambil jarak dengan jalur kekerasan angkatan bersenjata oleh aparat pemerintah maupun gerakan nasionalis untuk pembebasan dengan sikap secara netralitas sebagai *active citizen* warga aktif menuntui hak-politik. Perbedaannya, jika gerakan nasionalis menggunakan garis politik dan jika perlu dengan senjata dan kekerasan maka kelompok baru ini cenderung menggunakan perebutan *public sphere*, peran organisasi masyarakat seperti *Patani-Malay Civil Society Network for Peace* sebagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran sosial politik terhadap penderitaan masyarakat di zona konflik akibat kematian bersifat perang asimetris antara pemerintah Thailand dan gerakan BRN sebagai konfrontasi ideologi nasionalisme Siam-Thai dengan ideologi nasionalisme Melayu-Patani. Proses perdamaian untuk perubahan sosial politik di Patani tidak terlepas dari peran aktor-aktor baik *Civil Society Organizations* (CSOs), kultural masyarakat Patani dan tokoh masyarakat lokal maupun elit politik yang berada di pusat kekuasaan. Dengan modal-modal yang mereka memiliki mampu membawa perubahan yang signifikan dengan bekerjasamanya ketiga aktor itu dalam membangun perdamaian di Patani yang hakiki.

Kata Kunci; *nation-state*, minoritas, konflik, etnopolitik, *civil society*, damai, Thailand, Patani.

KATA PENGANTAR

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG

Segala puja dan puji kusembahkan bagi Allah SWT. Yang telah menciptakan alam dan cakrawala yang amat sempurna lagi indahny maklhuk ini, melalui segala rahmat dan hidayat-Nya. Sholawat dan salam tetap selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mempunyai mukjizat sebagai bapak revolusiner yang mengubah alam situasi dan kondisi jahiliah kepada kemerdekaan Islamiyah universar dengan cahaya yang dibawanya, telah menjadikan semua eksistensi menjadi kebenarannya. Dan keluarganya serta para sahabat yang setia korbakan memikul amanat doktrin yang murni ini hingga pasang surut dari generasi kegenerasi demi seterusnya.

Alhamdulillah berkat doa dari hidayah dan rahmat pertolongan-Nya, setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya penulis tesis ini dapat menyusun hingga selesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu dan dukungan baik dapat penyelesaian tesis yang berjudul; ***“Peran Civil Society Organizations dalam Proses Perdamaian di Patani (Role of Civil Society Organizations in the Peace Process in Patani)”***.

Dengan hormat dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak jutaan terimakasih kepada semuanya yang ikut memimbing dalam penyelesaian tesis ini. Bahwa sadar akan terbatas dari penulis, maka sekaligus penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

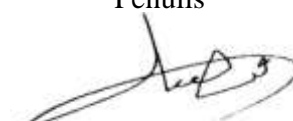
1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan sekaligus juga sebagai pembimbing tesis yang telah banyak memberi bimbingan dari detik awal sehingga saat akhir dalam penulisan tesis ini.
3. Semua dosen-dosen seluruh civitas akademisi yang penulis menerima berbagai ilmu pengetahuan dari konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI) di Pascasarjana, dan juga seluruh lembaga-lembaga bidang yang berkaitan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Melayu Patani “Jaringan Organisasi Masyarakat untuk Perdamaian atau *Civil Society Network for Peace*” (CSO Patani) para pimpinan dan pengurus pusat serta organisasi jaringannya.

5. Berdua orang tuaku, adik-adikku, cintaku, dan seluruh keluarga yang membantu dapat dukungan baik selama menempuhi perkuliahan di kota istimewa ini, atas memotivasi dan doanya.
6. Semua guru-guru yang telah menanam benih keilmuan terhadap diriku.
7. Teman-teman sekelas Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam dan seluruh sahabat yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
8. Teman-teman keluarga besar di Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI-Yogyakarta), dan PMIPTI Se-Indonesia, bahkan tidak lupa juga seluruh organisasi mahasiswa Patani di RI. Segenap organisasi kepemudaan Ikatan Pemuda Patani Se-Indonesia (IPPI) dan Gerakan Mahasiswa Indonesia Peduli Patani (GEMPITA).
9. Teman-teman aktivis Abu Amir dan Tarik Tawil dari *Ansaar International e.V.*, di Jerman. Mohamed Aymane Zizi warga asli Tunisia dari *Muslims Consditions* di Turkey. Pipit Maizier, jurnalis Tabloid JUBI. Juanda Djamal, direktur ACSTF. Rizka Argadianti Rachmah dan Tommy Albert Tobing dari LBH Jakarta, dalam saling membantu bahan sumber-sumber penelitian dan mendiskusikan dengan tema-tema tertentu.
10. Demikian juga teman-temanku berbagai pihak yang tidak menyusun sebutkan satu persatu atas bantuan dan partisipasinya.

Penelitian ini merupakan satu karya yang walaupun jauh dari kesempurnaan, namun harapan penyusun, ketidaksempurnaan ini dapat menjadi inspirasi bagi penyusun secara pribadi dan pembaca pada umumnya untuk lebih memperdalam ilmu yang berkaitan dengan masalah ini. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin sampaikan rasa terima kasih kepada kalian dalam memberi dan bantuan dalam mencari berbagai bahan sumber untuk tesis ini. Semoga Allah SWT. membalas jasa mereka serta dijadikan amal kebaikan yang di terima disisi-Nya. Amin.

Akhirnya dengan segala kebatasan yang ada pada diri penulis dalam menyusun tesis ini, semoga berharap karya kecil ini dapat memberi manfaat, semua yang dilakukan menjadi amal shaleh bagi khusus pembaca umumnya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 22 November 2016
Penulis



Mr. Faisol Mamang
NIM: 1420311041

DAFTAR SINGKATAN

A-NET	: <i>Advanced National Educational Test</i>
ABREP	: Angkatan Bersenjata Revolusi Patani
ACSTF	: <i>Acehnese Civil Society Task Force</i>
AJK	: Ahli Jawatan Kuasa
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATM	: Angkatan Tentera Malaysia
BERSATU	: Barisan Bersatu Kemerdekaan Patani
BIPP	: Barisan Islam Pembebasan Patani
BNPP	: Barisan Nasional Pembebasan Patani
BRG	: Bunga Raya Group untuk Pendidikan
BRN	: Barisan Revolusi Nasional
BUMI	: Pusat Budaya Melayu Patani
CCPD	: <i>Center of Culture Protection for Democracy</i>
CEO	: <i>Chief Executive Officer</i>
CICOT	: <i>Central Islamic Council of Thailand</i>
CS	: <i>Civil Society</i>
CSOs	: <i>Civil Society Organizations</i>
CrCF	: <i>Cross Cultural Foundation</i>
DBPMT	: Dewan Bahasa dan Pustaka Melayu Thailand
DEWAN	: Dewan Gerakan Pembebasan Patani
DIAMPAS	: Didikan Musim Panas
DMDI	: Dunia Melayu Dunia Islam
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
EHIA	: <i>Environment and Health Impact Assessment</i>
FFF	: <i>Fatoni Freedom Film</i>
FTU	: <i>Fatoni University</i>
GAMPAR	: Gabungan Melayu Patani Raya
GENAP	: Gerakan Perlindungan Anak Patani
GIP	: Gerakan Islam Patani
GMIP	: Gerakan Mujahidin Islam Patani
GRP	: Gerakan Rakyat Patani
GUP	: Gerakan Ulama Patani
JI	: <i>Jamaah Islamiyah</i>
JISDA	: <i>Jamiah Islam Syeik Daud Al-Fathoni</i>
HAF	: <i>Hilal Ahmar Foundation</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HAP	: Jaringan Hak Asasi Prikemanusiaan Patani
I-NET	: <i>Islamic National Educational Test</i>

ICC	: <i>International Criminal Court</i>
ICG	: <i>International Crisis Group</i>
IHL	: <i>International Humanitarian Law</i>
INSouth	: <i>Intellectual of Patani</i>
IPOLEKOSOSBUDMAHUUHAM:	Ilmu Pengetahuan, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Hukum, Hak Asasi Manusia
IS	: <i>Islamic State</i>
ISCOP	: <i>Islamic Co-Operative of Pattani Limited</i>
ISOC-D.4	: <i>Internal Security Operations Command-Divition 4</i>
JALEM	: Jaringan Belia Lembangan Sungai Teluban
JAMIN	: Jaringan Mangsa Kasus Keamanan Pattani
JARUM	: Jaringan Guru Sekolah Melayu
JASAD	: Jaringan Mangsa Undang-undang Darurat
JOP	: <i>Justice For Peace</i>
KAA	: Konfrensi Asia-Afrika
KD	: Keadaan Darurat
KEMAS	: Kesatuan Mangsa Songgora
KIAP	: <i>Kolej Islam Antarabangsa Pombing</i>
KMM	: Kelompok Mujahidin Malaysia
KPI	: <i>King Prajadhipok's Institute</i>
KRIS	: Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung
KSPI	: Kurikulum Standard Pendidikan Islam
KUMPAS	: Kursus Musim Panas
LDI	: <i>Local Development Institute</i>
LEMPAR	: Lembaga Patani Raya untuk Kedamaian dan Pembangunan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MAC	: <i>Muslim Attorney Center</i>
MAIP	: Mejlis Agama Islam Patani
MARA	: Majelis Amanah Rakyat Patani atau Mejlis Syura Patani
ML	: <i>Martial Law</i>
MLC	: <i>Muslim Lawyers Club</i>
MM	: Masyarakat Madani
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MPRMP	: Mejlis Permusyawaratan Rakyat Melayu Patani
MUSTFETH	: <i>Muslim Students Federation of Thailand</i>
NASOSI	: Nasionalisme Islamisme Sosialisme
NCPO	: <i>National Council for Peace and Order</i>
NCWP	: <i>The Network of Civic Women for Peace</i>
NFE	: <i>Office of the Non-Formal and Informal Education</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NIETS	: <i>National Institute of Educational Testing Service</i>
NRC	: <i>National Reconciliation Commission</i>

NSC	: <i>National Security Council</i>
NSM	: <i>New Social Movement</i>
O-NET	: <i>Ordinary National Educational Test</i>
OBEC	: <i>Office of the Basic Education Commission</i>
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
ONESQA	: <i>Office of Nation Education Standards and Quality Assessment</i>
OPEC	: <i>Office of the Private Education Commission</i>
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Ormawa	: Organisasi Mahasiswa
PAD	: <i>People's Alliance for Democracy</i>
PADAM	: <i>Pusat Mengembangkan dan Meningkatkan Mutu Kehidupan</i>
PAS	: Partai Islam Se-Malaysia
Parpol	: Partai Politik
PARANAS	: Partai Revolusi Nasional
PARTIP	: Partai Islam Patani
PATRIOT	: Pertubuhan Islam Patani
PBB	: Perserikatan Bangsa Bersatu
PC	: <i>People's College of Patani</i>
PD	: Perang Dunia
PDRC	: <i>People's Democratic Reform Committee</i>
PDRM	: <i>Polis Diraja Malaysia</i>
Pemilu	: Pemilihan Umum
PETIDAM	: Perguruan Tinggi Islam Darul Ma'arif
PETIT	: <i>Pengajian Tinggi Islam Tebing</i>
PERMAI	: <i>Persatuan Majelis Agama Islam Wilayah Selatan Thailand</i>
PERKASA	: Yayasan Pusat Penyelarasan Tadika Selatan Thailand
PERMATAMAS	: Persekutuan Rakyat Mempertahankan Hak Masyarakat dan Sumber Daya Alam untuk Perdamain
PerMAS	: Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani
PerSHaP	: Persatuan Silat Harimau Patani
PERWANI	: Persatuan Perempuan Patani
PESKHAF	: Persatuan Seni Khat Anak Fathoni
PEWANI	: Persatuan Warisan Sri Patani
PHOS	: <i>Public Health Officer for Social Welfare</i>
PI	: <i>Patani Institute</i>
PKM	: Partai Komunis Malaya
PKT	: Partai Komunis Thai
PICSEB	: Persatuan Intelek Cinta Seni Budaya
PLTB	: Pembangunan Pembangkitan Listrik Tenaga Batubara
PM	: Perdana Menteri
PMM	: <i>Patani Malay Movement</i>

PNU	: <i>Princes of Naradhiwas University</i>
PNYS	: Persatuan Mahasiswa Sempadan Selatan Thai di Bangkok (<i>P; Patani, N; Narathiwat, Y; Yala, S; Songkhla dan Setul</i>).
PPP	: <i>People's Power Party</i> atau <i>Palang Prachachon Party</i>
PSP	: Persatuan Semangat Patani
PSU	: <i>Prince of Songkla University</i>
PUKIS	: Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam
PULO	: <i>Patani United Liberation Organisation</i>
PUSAKA	: Pusat Persatuan Tadika Menara
PUSTA	: <i>Pusat Pemulihan Seni Budaya Tempatan dan Alam Sekitar Wilayah Sempadan Selatan Thailand</i>
PUSTAKA	: Pusat Taman Didikan kanak-kanak
REMAS	: Remaja Perubahan Masyarakat
RSD	: <i>Right to Self Determination</i>
SBPAC	: <i>Southern Border Provinces Administration Centre</i>
SCG	: <i>Siam Cement Group Foundation</i>
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sekjen	: Sekretaris Jenderal atau Sekretaris General
SFST	: <i>Student Federations Southen of Thailand</i>
SPAN	: <i>Southern Paralegal Advocacy Network</i>
SPF	: <i>Sasakawa Peace Foundation</i>
STMSG	: <i>South Thailand Muslim Students Group</i>
SUPSPT	: <i>Students Union of Promote in Souternmost Provinces of Thailand</i>
TADIKA	: Taman Didikan Kanak-Kanak
TMSA	: <i>Thai Muslim Student Association</i>
ToR	: <i>Terms of Reference</i>
TRT	: <i>Thai Rak Thai Party</i>
UDD	: <i>United Front of Democracy Against Dictatorship</i>
UMNO	: <i>United Malay Nations Organizing</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UK	: <i>United Kingdom</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
Wartani	: Warta Patani
YABIS	: <i>Yala Business Administration Islamic School</i>
YAKIST	: Yayasan Kebudayaan Islam Selatan Thailand
YMAT	: <i>Young Muslim Association of Thailand</i>
YICE	: <i>Youth Integration for Community Empowerment Center</i>
YRU	: <i>Yala Rajabhat University</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Kegunaan Penelitian.....	18
D. Kajian Pustaka	18
E. Kerangka Teoritis	22
F. Metodologi Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II: MINORITAS MALAY-MUSLIM DAN CIVIL SOCIETY PATANI 30	
A. Konsep Negara Bangsa.....	31
B. Konteks Minoritas Muslim	48
C. Gerakan Minoritas Melalui Negosiasi Politik	60
D. Sejarah dan Konseptualisasi Civil Society	88
E. Gerakan Sosial Politik dan Civil Society dari Bangkok ke Patani	100
F. Identitas dalam Politisasi Parlemen.....	108
G. Politik Demokratisasi Sentralistik	120
H. Muslim Society; Dakwah dan Pendidikan.....	125
I. Sosial Kultural Muslim Patani.....	144
J. Ekonomi Islam; Sistem Syariah Kemandirian.....	149
BAB III: PERAN GERAKAN CIVIL SOCIETY UNTUK PERDAMAIAN 157	
A. Aktivis Penegakan Hukum dan Pembela HAM	158
B. Melenan Asimilasi Melalui Bahasa	165
C. Dinamika Budaya Patani Dimensi Ke-Melayu-an	185
D. Opini Publik untuk Keadilan Sosial	197

E. Media Damai sebagai Alternatif.....	208
F. Pelestarian dan Mengawasi Kekayaan Sumber Daya Alam.....	213
BAB IV: ARAH PENYELESAIAN UNTUK PERDAMAIAN	225
A. Definisi Perang dan Damai di Pa(t)tani	228
B. Aktivitas Negosiasi Politik Aksi dan Kampanye.....	237
C. Gerakan Mahasiswa Patani.....	258
D. Memahami Wacana Melayu-Islam-Patani	261
E. Dari Bangkok ke Kuala Lumpur Dialog Tiada Daya Gerak	263
F. Patani Center.....	269
BAB V: PENUTUP	274
A. Kesimpulan.....	274
B. Saran	280
DAFTAR PUSTAKA	284
CURRICULUM VITAE.....	299

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perubahan sosial-politik dari konflik etnopolitik bagi minoritas Muslim di Patani¹ atau Thailand Selatan tidak terlepas dari peran aktor-aktor baik *Civil Society Organizations* (CSOs), kultural masyarakat Patani dan elit politik yang berada di pusat kekuasaan. Dengan modal-modal yang mereka memiliki mampu membawa perubahan yang signifikan dengan bekerjasamanya ketiga aktor itu dalam membangun perdamaian di Patani. Proses perdamaian Patani melalui rekonsiliasi dan rekonstruksi mampu mengiringi antara masyarakat Patani dan pemerintah Thailand membuka pintu perubahan untuk Patani dan Thailand dalam suatu wadah. Dengan demikian proses perdamaian yang hakiki harus pula berbijak pada nilai-nilai kebudayaan Patani (*Islam-Malays*) mampu mengiring suatu perubahan sosial-politik. Ini kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tidak dapat mengadopsi pada budaya dan masyarakat politik (*political society*) Patani yang mayoritas *Muslim-Malays* sehingga munculnya kebangkitan identitas nasional (kebangsaan Melayu-Patani) sebagai hak pertuanan.

Dengan situasi “perang asimetris (*asymmetric warfare*)” tersebut konflik dan kekerasan bersenjata dari aktor-aktor perang (*armed conflict*) masing-masing mempunyai ideolog nasionalis tertentu yaitu nasionalisme Siam-Thai dengan nasionalisme Melayu-Patani, namun kondisi konflik terkini terutamanya antara pemerintah pusat Thailand di Bangkok dengan gerakan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN)² yang diwakili oleh masyarakat Patani, dalam menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi harus juga keterlibatan pihak ketiga yaitu aktor asing untuk dorongan dan dukungan sehingga melahirkan kesepakatan perhatian peremusan akibat konflik dan memprosesi perdamaian yang hakiki. Dalam konflik etnopolitik (*ethnopolitical conflict*) bersifat loyalitas yang terjadi dapat ditemui bahwa konflik pada umumnya berakar pada latar belakang politik, maupun berasal

¹ Nama Patani atau Pattani, ada perebutan aksan dalam penggunaan kata “Patani” antara orang-orang Thai dan orang Melayu di tiga provinsi yang bergolak ini. Aksan Thai menggunakan dobel tt (Pattani) sementara kaum Melayu menggunakan satu “t” (Patani). Dalam naskah ini akan menggunakan Patani dengan satu “t”.

² BRN atau *Patani Malay National Revolutionary Front*, didirikan 13 Maret 2016. Lihat juga misalnya, Sascha Helbardt, “*Deciphering Southern Thailand's Violence: Organization and Insurgent Practices of BRN-Coordinate*”, (Singapore: ISEAS Institute of Southeast Asian Studies-Yusof Ishak Institute, 2015), hlm. 13.

dari kebijakan yang ketidakadilan. Di sisi lain, ketidak-imbangan alokasi sumber daya telah mendorong rasa ketidakadilan yang berujung pada konflik. Sementara, isu agama, etnis, sejarah dan pembebasan maupun separatism, merupakan faktor pemicu yang membungkuskan konflik terus berkepanjangan. Dalam situasi konflik, hampir seluruh fungsi-fungsi pemerintah tidak dapat berjalan efektif.

Semenjak tahun 2004 merupakan cetusan manifesto politik pada era “Revolusi Patani” dengan secara gerilya, dalam situasi dan kondisi konflik lebih kurang satu dekade dengan tanpa titik temu untuk berakhir. Walaupun negosiasi politik melalui proses dialog perdamaian (*peace dialogue process*) antara pemerintah Thailand dengan BRN pada 28 Febuari 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia sering beberapa kali namun tidak begitu nampaknya resolusi yang paling terbaik dalam menyelesaikan masalah konflik, karena kondisi pemerintah pusat di Bangkok sedang melanda krisis politik internal sehingga muncul kudeta Thailand pada 2014 merampas kekuasaan kembali pemerintah diktator militer. Justru dampak dari konflik dan kekerasan dengan operasi bersenjata semakin kuat sehingga kebelakangi ini dapat mengurangi dan menghindari sasaran mangsa terkorban bukan kelompok sesama angkatan bersenjata, akan tetapi rasa ketakutan bagi penduduk di zona konflik dan seluruh warganegara masih berharap untuk berhenti segala operasi kekerasan dan aktivitas bersenjata yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan harus mengembalikan ke meja dialog untuk mendapatkan kontrak yang bersepakatan sehingga terus mengembalikan hak-hak mereka dengan kesejahteraan bagi warga setempat dengan membangunkan proses perdamaian yang hakiki.

Konflik etnopolitik antara Siam-Patani telah lama berabad-abad salah satu faktor problem yang tidak bisa dipungkiri bahwa berlarut-larutnya konflik dan kekerasan di area tersebut tidak hanya disebabkan dan didorong oleh perbedaan kepentingan politik, melainkan juga memiliki akar yang dalam. Hal itu meliputi perbedaan kultural termasuk di dalamnya agama, bahasa, dan klaim historis atas tanah atau kawasan. Dari akar-akar itu rakyat di kawasan tersebut memiliki legitimasi untuk mengklaim bahwa tanah atau daerah mereka tidak menjadi bagian integral dari pusat pemerintahan negara Thailand dengan tuntutan merdeka atau menjadi daerah otonom. Namun, di sisi lain, di dalam komunitas Muslim itu sendiri

juga memunculkan kelompok-kelompok dan individu yang satu sama lain tidak selalu sama dalam pandangan dan bahkan agendanya.

Mayoritas penduduk negara Thailand beragama Buddha sedangkan di Thailand Selatan atau Patani paling tidak adalah provinsi mayoritas Muslim. Dan di daerah-daerah mayoritas Muslim itulah yang selama ini terjadi konflik dan kekerasan berlarut. Namun di tengah hiruk-pikuk konflik dan kekerasan yang berlarut itu, di dalam komunitas Muslim di daerah tersebut terdapat berbagai lembaga dan tokoh individu yang terus-menerus mengusahakan terjadinya perdamaian antara masyarakat di daerah itu dengan pemerintah pusat tanpa harus mereduksi prinsip-prinsip tuntutan atau aspirasi masing-masing masyarakat. Dengan demikian, pada realitasnya, di balik konflik dan kekerasan yang berlarut-larut juga terdapat pihak-pihak yang terus-menerus mencari solusi alternatif melalui perdamaian. Penelitian ini memfokuskan untuk menelusuri kiprah mereka yang disebut terakhir tersebut.

Karena konflik dan kekerasan di kawasan tersebut tidak hanya pada dataran kepentingan politik melainkan berakar pada identitas kultural, maka usaha untuk mencari jalan damai harus pula mencari penyelesaian dan titik temu pada dataran tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana lembaga dan perorangan yang mencari jalan damai itu membangun konsep harmonisasi kultural, termasuk agama, bahasa, dan klaim historis atas tanah serta menegosiasikan kepentingan politik di antara mereka sendiri, antara Muslim minoritas dengan penduduk mayoritas serta pemerintah pusat di negara tersebut?

Menurut penelusuran Thanet Aphornsuvan, semula dua komunitas suku Siam yang berada di utara di bawah Kerajaan Siam yang sekarang disebut Kerajaan Thailand, dan masyarakat Melayu di daerah selatan yang kini disebut Thailand Selatan atau Patani (dulu Kesultanan Patani), hidup rukun, meskipun mereka berbeda agama dan etnis. Ketegangan dan kekerasan muncul ketika kerajaan Siam membangun nasionalisme modern Thailand dalam bentuk kerajaan konstitusional. Dalam pembentukan nasionalisme Thailand tersebut mereka menekankan pada identitas nasional dengan memasukkan daerah selatan sebagai bagian dari kerajaan. Bersamaan dengan itu juga diperkenalkan sistem baru dalam negara-bangsa (*nation-state*) yang disebut modernisasi. Modernisasi yang diterapkan di antaranya

adalah sistem yang bersifat nasional, khususnya penyeragaman bahasa dan sistem sekolah yang diharuskan mengikuti peraturan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Maka terjadilah pemaksaan di mana mereka yang menentang kebijakan pusat mendapat konsekuensi mulai dari penangkapan, pemenjaraan sampai pembunuhan.³ Program yang lebih massal proses transmigrasi yang bersifat besar-besaran tersebut membuat komunitas Muslim di daerah tersebut menjadi minoritas. Sehingga pemerintah Thailand menerapkan kebijakan penyeragaman identitas nasional dan modernisasi yang cenderung pada penyeragaman secara paksa yang tidak sepenuhnya sejalan dengan aspirasi kaum Muslim di Patani.⁴

Dari periode inilah muncul perlawanan mulai dari pemogokan sipil seperti tidak mengikuti sistem pendidikan dengan tetap bertahan menerapkan sistem tradisional di pondok pesantren sampai penggunaan bahasa Melayu di lembaga pendidikan yang dilarang itu, hingga pemberontakan bersenjata. Di Thailand, misalnya, diterapkan politik bahasa dengan memaksakan bahasa Thai sebagai bahasa nasional di sekolah, termasuk di sekolah Islam dan pondok dengan melarang penggunaan bahasa Melayu. Bahkan pemaksaan bahasa Thai tersebut termasuk dalam pengajaran agama Islam. Perlawanan terhadap politik penyeragaman bahasa ini sempat memacetkan komunikasi hampir total. Hal ini karena pemerintah pusat tidak bersedia berkomunikasi selain dengan bahasa Thai. Sebaliknya kaum Muslim di Selatan menolak untuk menggunakan bahasa Thai melainkan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu mereka, khususnya dalam pengajaran Islam dan ketika berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Ketegangan dan konflik tersebut membawa pada terbentuknya identitas agama-etnik (Islam-Melayu) komunitas di Selatan daerah tersebut berhadapan dengan Siam/Thai yang Buddhis yang mayoritas dan direpresentasikan oleh pemerintah pusat.⁵

Minoritas Muslim dengan demikian, secara politik ada perbedaan kepentingan antara masyarakat di Patani dan masyarakat mayoritas maupun

³ Lihat juga Thanet Aphornasuvan, "*Nation-State and the Muslim Identity in the Southern Unrest and Violence*," dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, eds. *Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand* (Bangkok: KAS, 2006), hlm. 92-127.

⁴ W.K. Che Man, "*Muslim Separatism the Moros of Southern Philipines and the Malays of Southern Thailand*", (Manila: Ateneo de Manila University Press, 1990), hlm. 19-32.

⁵ Lihat juga Thanet Aphornasuvan, "*Nation-State and the Muslim Identity in the Southern Unrest and Violence*," dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, eds. *Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand* (Bangkok: KAS, 2006), hlm. 92-127.

pemerintah pusat. Perbedaan itu diperkuat dengan perbedaan identitas agama mayoritas versus minoritas. Pemerintah pusat Thailand memiliki program yang seragam mengacu kepada identitas nasional untuk semua wilayah di negara itu sebagai proses perubahan atau modernisasi. Sementara itu, karena perbedaan kepentingan dengan masyarakat setempat maka kebijakan penyeragaman atau modernisasi itu mendapatkan tantangan dari mereka karena memiliki karakter dan agendanya sendiri. Perbedaan itu menimbulkan kesenjangan ekonomi dan politik antara minoritas Muslim di kawasan Patani dengan mayoritas. Kesenjangan tersebut pada ujungnya memunculkan ketidakpuasan yang kemudian memicu konflik dan kekerasan.⁶

Sedangkan secara kultural, posisi mereka yang minoritas di tengah bangsa mayoritas yang bukan saja berlainan agama melainkan juga etnis dan bahasa, menambah akumulasi problem identitas politik mereka. Secara etnis dan bahasa, Muslim Patani tersebut adalah bagian dari kawasan etnis Melayu yang serumpun dengan Muslim di Singapura, Malaysia, dan Sumatera. Ini berbeda dengan mayoritas penduduk di negara tersebut.⁷ Lebih dari itu, minoritas Muslim di Patani memiliki klaim historis atas tanah yang mereka diami sebagai bekas wilayah Kesultanan Islam sebelum daerah itu menjadi bagian negara nasional.⁸ Hal ini menambah akumulasi identitas politik yang berbenturan dengan pemerintah pusat.

Pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya perbedaan identitas politik dan kultural tersebut tidak memungkinkan terbangunnya suatu titik temu di antara keduanya? Jawabannya bukan tidak mungkin. Bert Klanderments, misalnya, menunjukkan bahwa salah satu faktor utama dari transformasi gerakan yang berbasis perbedaan identitas adalah bergantinya aktivis dan regenerasi kepemimpinan.⁹ Dengan adanya pergantian itu maka sebuah gerakan politik bisa berubah dari keras menjadi lunak dan sebaliknya tergantung berbagai faktor yang melingkupinya. Sementara itu, Ernesto Laclau menunjukkan bahwa bahkan

⁶ W.K. Che Man, "*Muslim Separatism the Moros of Southern Philipines and the Malays of Southern Thailand*", (Manila: Ateneo de Manila University Press, 1990), hlm. 19-32.

⁷ Hussin Mutalib, "*Islam dan Etnisitas Perspektif Melayu*", (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 48-53.

⁸ Lihat juga Surin Pitsuwan, "*Islam di Muangthai; Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*", terj. Hasan Basri, (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 21.

⁹ Bert Klanderments, "*Transient Identities? Memberships Pattern in the Dutch Peace Movement*," dalam Enrique Laraña et. al., ed. *New Social Movements from Ideology to Identity* (Philadelphia: Temple University Press, 1994), hlm. 168-170.

perbedaan antara identitas partikular seperti identitas budaya lokal dan agama dengan identitas universal bukan tidak mungkin terjadi suatu titik temu. Dengan optimistis Laclau menunjukkan bahwa tercapainya titik temu partikularitas dan universalitas seperti ini merupakan suatu capaian demokrasi yang lebih tinggi.¹⁰

Sementara itu, mengenai agama yang bisa menjadi faktor utama dalam membangun dan memperkeras identitas politik dan kultural, Scott Appleby menunjukkan dua dimensi dari agama. Yaitu bahwa agama bisa menjadi faktor dalam konflik dan kekerasan namun juga bisa menjadi faktor bagi transformasi konflik dan kekerasan menjadi perdamaian dan rekonsiliasi. Di antara argumen yang dikemukakan oleh Appleby adalah bahwa perbedaan pendapat yang terus terjaga di kalangan pemikir dan pemimpin di dalam agama itu sendiri sehingga ide-ide peran agama untuk menjadi faktor transformasi akan terus hidup. Selain itu, gerakan agama di berbagai wilayah pada kenyataannya bukan hanya diinisiasi oleh kalangan pemimpin agama melainkan juga masuk ke dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan gerakan hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan, dan hak-hak budaya lokal di dalam kelompok agama itu sendiri. Pada saat itulah agama akan menjadi faktor dalam membangun perdamaian dan rekonsiliasi.¹¹

Problem yang sama sebagaimana dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo dan Manuel Castells tampaknya terjadi pada kasus Muslim minoritas Patani di Thailand Selatan. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan itu, masyarakat Muslim Patani yang merasa berbeda agama, etnis, dan klaim historis atas tanah menganggap bahwa pemerintah pusat tersebut adalah penjajah “semacam kolonial” yang sedang menawarkan perubahan atau modernisasi dengan identitas tunggal, yaitu identitas nasional Thailand (men-Siamisasi-kan) yang berbeda dan menggerus identitas kultural yang mereka miliki. Perbedaan kepentingan politik antara nasional dan lokal dengan identitas ini mendorong masyarakat minoritas Patani itu melakukan pemberontakan melalui konflik dan bahkan kekerasan. Gerakan dengan menuntut kemerdekaan wilayah tersebut mungkin bisa disebut sebagai “gerakan nasionalis (*nationalist movements*)”, yaitu suatu gerakan oleh kelompok minoritas atas dasar

¹⁰ Ernesto Laclau, “Introduction” dalam “*The Making of Political Identities*”, (New York: Verso, 1994), hlm. 5.

¹¹ R. Scott Appleby, “*The Ambivalence of the Sacred, Religion, Violence, and Reconciliation*”, (New York: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2000), hlm. 281.

identitas politik berdasar kultural dan klaim kewilayahan tertentu atas pemerintah pusat karena merasa ditindas oleh kelompok mayoritas. Jika aspirasi itu tidak bisa dicari titik temu maka kekerasan adalah salah satu konsekuensinya.

Menurut Hudson Meadwell,¹² ada tiga faktor yang membuat terjadinya mobilisasi kultural berhadapan dengan mayoritas dan pemerintah pusat, yaitu berkaitan dengan kemajuan dan perubahan ekonomi; adanya ketidaksederajatan dalam kesempatan pendidikan, lapangan kerja, dan ekspresi; serta meningkatnya kelas menengah yang bisa merumuskan kepentingan bagi mereka. Sedangkan Peter Chalk¹³ berpendapat bahwa setidaknya ada tiga faktor yang menjadi akar penyebab gerakan minoritas Muslim atas pemerintah pusat dan mayoritas. *Pertama*, ketidaksensitifan pemerintah pusat terhadap keprihatian lokal, kemiskinan, ketertinggalan pendidikan, dan langkanya lapangan kerja di satu pihak dan ke-abai-an atau ketidakpedulian regional atau pemerintah dan masyarakat di sekitarnya di pihak lain. *Kedua*, represi militer dan penyeragaman identitas; dan *Ketiga*, kekuatan dorongan Islam.

Dalam konteks hak-hak kelompok minoritas di dalam negara nasional, Willy Kymlicka¹⁴ berpendapat bahwa baik minoritas pribumi atau *native* maupun imigran harus diberi hak yang sama dengan mayoritas dalam identitas nasional. Keduanya memiliki hak sederajat dalam konstitusi maupun sosial-ekonomi-politik. Namun mereka dibedakan bahwa, imigran tidak memiliki hak untuk menuntut *self-government*, berbeda dengan minoritas pribumi. Menurut Kymlicka, minoritas pribumi seharusnya memiliki hak untuk menuntut atau diberi *self-government*. Dalam konteks berlarutnya konflik dan kekerasan di Patani dengan Thailand, dengan demikian, bisa dilihat adanya konsep nasionalisme yang berbasis pada negara-bangsa (*nation-state*) di satu pihak dan tidak diberikannya hak *self-government* kepada kelompok minoritas tersebut di lain pihak.

Selanjutnya, identitas nasional (*national identity*) biasa dikatakan sebagai suatu fenomena modern yang membentuk solidaritas dari berbagai elemen suatu

¹² Hudson Meadwell, "Forms of Cultural Mobilization in Québec and Brittany, 1870-1914", *Comparative Politics* 15, no. 4 (July 1983), hlm. 401-417.

¹³ Peter Chalk, "Separatism and Southeast Asia: The Islamic Factor in Southeastern Thailand, Mindanao and Aceh", *Studies in Conflict & Terrorism* 24 (2001), hlm. 241-269 dan 259.

¹⁴ Will Kymlicka, "Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights", (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 63.

masyarakat di dalam kawasan teritorial tertentu yang kemudian menjadi bangsa atau negara-bangsa (*nation-state*).¹⁵ Menurut Anthony Smith, identitas nasional adalah sesuatu yang mencakup hampir seluruh dimensi kehidupan sehingga ia menjadi suatu kekuatan yang eksklusif dan inklusif sekaligus. Ia bukan hanya dalam aspek politik, ekonomi tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari atau budaya.¹⁶

Elemen-elemen tersebut bisa terdiri dari banyak hal seperti etnis, agama, kultur dan kebiasaan lokal, ras dan sebagainya. Meski demikian, identitas nasional tidak meleburkan secara tuntas keseluruhan dari elemen-elemen tersebut. Bangsa dalam pengertian modern sesungguhnya lebih menyerupai apa yang oleh Benedict Anderson disebut sebagai *imagined communities*,¹⁷ suatu bentuk masyarakat yang diangankan sebagai satu kesatuan tetapi elemen-elemen di dalamnya sesungguhnya masih bertahan. Identitas nasional, dengan demikian, adalah suatu bentuk hubungan yang bersifat dinamis antara elemen-elemen tersebut yang bisa berubah dari waktu ke waktu lain. Hubungan antara elemen-elemen tersebut terikat oleh suatu perjanjian bersama berupa konstitusi.

Namun betapa pun solidnya identitas nasional tersebut tidak karena desakan dari luar seperti globalisasi maupun yang berasal dari dalam dengan makin tumbuhnya kesadaran akan hak-hak, seperti hak kultural dan keadilan ekonomi minoritas atau mereka yang terpinggirkan dengan berbagai alasan. Di masa lalu, setidaknya hingga Perang Dunia II tetapi pengaruhnya masih terasa hingga sekarang, identitas nasional bisa berimplikasi bagi usaha penghapusan elemen etnis, kultur lokal, agama demi kesatuan bangsa, dengan cara yang paling halus melalui asimilasi sampai pemaksaan dan kekerasan. Asumsi identitas nasional yang bersifat homogen dan mencakup itu kini sedang dipertanyakan kembali secara deras dan munculnya faktor global dan kesadaran hak dari elemen-elemen di dalamnya, terutama paska berakhirnya Perang Dingin.¹⁸ Artinya, identitas nasional sebagai suatu kesatuan yang mencakup dan bentuk solidaritas dalam lingkup teritorial tertentu yang disepakati sebagai suatu negara atau negara-bangsa (*nation-state*),

¹⁵ Anthony D. Smith, "*National Identity*", (Nevada: Nevada University Press, 1991), hlm. 19-42.

¹⁶ *Ibid.* hlm 143-144.

¹⁷ Benedict Anderson, "*Imagined Communities; Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*", (Manila: Verso, 2004), Edisi Revisi.

¹⁸ Anthony Smith, "*National Identity*", (Nevada: Nevada University Press, 1991), hlm. 145-150.

bisa terus dipertahankan. Namun realitas baru pengaruh global dan bangkitkan kesadaran internal itu menuntut adanya suatu bentuk baru hubungan antara elemen di dalam lingkup negara-bangsa itu sendiri.

Fenomena minoritas Muslim di lingkup negara Thailand bisa jadi merupakan bukti dari fenomena tersebut. Meskipun tuntutan itu muncul sejak kemerdekaan segera setelah Perang Dunia II, tetapi kini mengalami pergeseran yang signifikan. Misalnya, di satu pihak mereka telah melepaskan tuntutan atas kemerdekaan namun di lain sisi mereka menuntut hak yang lebih substantif misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan hak untuk memerintah sendiri (*self-government*). Demikian halnya, di dalam minoritas Muslim di wilayah itu juga mengalami pergeseran baik strategi maupun tuntutan. Jika dulu gerakan pembebasan atau separatisme cenderung dianggap sebagai representasi satu-satunya bagi minoritas untuk menuntut kemerdekaan maupun otonomi, kini muncul kelompok-kelompok *Civil Society* dan bahkan gerakan individu yang cenderung menggunakan *public sphere* dan penguatan masyarakat sipil sebagai strategi perjuangan untuk mencapai tujuan dan menuntut hak mereka sebagai minoritas.¹⁹

Melihat konteks transisional yang melatari kemunculan aspek *Civil Society*²⁰ selama satu dekade ke belakang ini masyarakat penduduk di tiga provinsi ini adalah mangsa dan korban oleh karena status mereka adalah penduduk di area konflik dan telah berpengalaman langsung dengan kekerasan yang berlaku, dari akibat konflik juga dapat berhasil untuk bergerak dan peranan dalam memobilisasi dalam menyelesaikan bagaimana caranya. Pada waktu yang sama munculnya organisasi kemasyarakatan untuk perdamaian pascademontarasi di Masjid Jamek Patani pada tahun 2007. Yang mengambil peran dan fungsi penting bergerak untuk perdamaian,

¹⁹ Gothom Arya, "Local Patriotism and the Need for Second Language and Education Policies in the Southern Border Provinces", dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, eds. "Understanding Conflict Approaching Peace in Southern Thailand", (Bangkok: KAS, 2006), hlm. 17.

²⁰ Istilah *Civil Society* kembali menguat ketika adanya gerakan solidaritas sosial di Polandia, yang dilakukan oleh Lech Walesa, untuk melakukan perlawanan terhadap rezim diktator Jenderal Jeruzeiki. Dalam perkembangannya di Indonesia, istilah *Civil Society* pada tahun 70-an sudah mulai ramai diperbincangkan oleh kalangan aktivis dan intelektual, yang kemudian menemukan momentumnya ketika masuk pada era awal tahun 80-an, dimana perdebatan istilah *Civil Society* semakin mengumuka. Dan hingga saat ini tidak ada kesepakatan mutlak tentang padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Dan juga saat ini istilah *Civil Society* di Patani dan Thailand ada yang mengartikan masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat warga maupun masyarakat kewargaan. Untuk itu, dalam tulisan ini tidak mempersoalkan tentang perbedaan padanya, bahkan ini menggunakan secara bergantian. Dalam konteks tulisan ini hanya menekankan pada sifat-sifat dasar dari *Civil Society* yaitu adanya sikap-sikap *Volunteerism* atau keawadayaan sosial, kemandirian, kesukarelaan ataupun sebagai manusia maupun sebagai warga negara.

oleh salah satu sebabnya *Civil Society* ini paling dekat dengan kelompok masyarakat dan selaku wakil dari kalangan rakyat pada penduduk setempat yang mana para intelektual, sarjanawan dan pengamat keadaaan konflik dan akan pasti mengetahui asal usul akibat konflik paling terbaik, oleh karena itu, *Civil Society* paling terdekat lagi sangat akrab dengan masyarakat maka apabila soal dinamika munculnya dan peran *Civil Society* dalam penyelesaian konflik terdapat untuk mencari posisi kenyataan sekaligus keberadaan organisasi masyarakat Islam (*Civil Islam*) peran bersama dalam menyelesaikan pada masa akan mendatang.

Pada kekinian bahwa *Civil Society* di Patani dapat muncul beberapa banyak yang mengambil sikap insiatif melaksanakan tugas rasa tanggungjawab terhadap masyarakatnya dan mempunyai jaringan-jaringan sebagai koordinasi dengan beberapa organisasi yang aktif untuk bekerjasama, apabila dipandang perspektif gambaran secara umum terdapat bahwa *Civil Society* masih kurang dan sedikitnya dengan jumlah berada *Civil Society* bagi statistik penduduk hampir dua juta-an, namun yang keikutsertaan hanya beberapa ratusan anggota tenaga juru pelaksana dan beberapa ribuan anggota yang mendaftarkan selaku massa, pada hal masih banyak *Civil Society* lagi yang belum mendeklarasi dirinya maupun bergerak secara tersendiri dan sebagainya bergerak diposisi ruang penggir dan lagi membatasi kelompok tertentu seperti ras, etnis, agama, oleh karena itu Muslim selaku mayoritas pada penduduk kawasan ini seharusnya sikap atas pendirian dalam peran untuk menciptakan sosial baru dalam kerjasama lebih sebanyak mungkin.

Di samping munculnya berbagai kekerasan akibat jalan buntu dialog formal melalui negosiasi politik sebagaimana diuraikan di atas, di dalam masyarakat di Patani juga muncul kelompok-kelompok baru yang secara organisasional berjarak dengan kelompok-kelompok gerakan pembebasan maupun separatis. Mereka diwakili oleh kelompok-kelompok *Civil Society* seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun *Civil Society Organization* (CSO), kelompok sosial-budaya dan kelompok keagamaan serta aksi-aksi kampanye yang bersifat individual.

Secara nasional munculnya kelompok-kelompok tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika tuntutan keterbukaan dan demokratisasi di dalam negeri tersebut sehingga memunculkan kelompok-kelompok kritis. Di sisi lain hal tersebut

juga dipengaruhi oleh munculnya *Trend Civil Society* yang bersifat global, termasuk berbagai bentuk bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang, secara langsung maupun tidak langsung, ikut memperkuat kelompok-kelompok lokal tersebut.²¹

Kelompok-kelompok baru tersebut meskipun tidak anti dan dalam batas tertentu tetap menjalin komunikasi dengan para gerakan pembebasan atau separatis tetapi mereka mencari jalan sendiri dalam upaya mencari solusi tuntutan hak-hak komunitas Muslim di wilayah itu. Perbedaannya, jika kelompok-kelompok gerakan pembebasan atau separatis menggunakan garis politik dan jika perlu dengan senjata dan kekerasan maka kelompok baru ini cenderung menggunakan perebutan *public sphere*, penguatan masyarakat sipil dan penguasaan terhadap jalur-jalur modern seperti media massa, pendidikan politik dan penguatan ekonomi untuk berbagai sasaran yang spesifik, seperti peningkatan ekonomi keluarga, perempuan, pengusaha kecil dan menengah.

Kelompok-kelompok baru tersebut juga bisa dibedakan dari kelompok akomodasionis dengan pemerintah atau mereka yang menggunakan jalur politik umum yang ditawarkan oleh pemerintah pusat seperti melalui partai politik nasional, birokrasi dan lembaga-lembaga yang secara langsung dibentuk oleh pemerintah pusat. Kelompok-kelompok baru tersebut tampaknya mengambil posisi dengan apa yang oleh Antonio Gramsci disebut sebagai “*war of position*”.²² Kelompok-kelompok ini dengan sengaja mengambil jarak dan bahkan berhadapan-jadapan jika tidak ditemukan titik temu, namun tidak juga alergi untuk kerjasama dalam hal-hal yang bersifat strategis, baik dengan pemerintah pusat maupun dengan kelompok-kelompok gerakan pembebasan tradisional ataupun separatis dan kelompok akomodasionis. Mereka lebih mementingkan substansi aspirasi yang diembannya ketimbang bentuk dan strategi perjuangannya.

²¹ David C. Schak, Wayne Hudson, “*Civil Society in Asia*”, (Ashgate University of Michigan, 2003), hlm. 16.

²² Antonio Gramsci, “*State and Civil Society*,” dalam Arachana Shama and Akhil Gupta, eds. *The Anthropology of the State: A Reader* (Victoria: Blackwell Publishing, 2006), hlm. 75-76. Lihat juga Robert W. Cox, “*Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay on Method*,” dalam James Martin, ed. Gramsci, Antonio, *Critical Assessments of Leading Political Philosophers*, Edited by (New York: Routledge, 2002), hlm. 360-361.

Dengan strategi itu, kelompok-kelompok tersebut juga tampak membiarkan dan memfasilitasi munculnya pluralitas dalam komunitas Muslim sendiri secara wajar.²³ Di masa lalu, gerakan pembebasan itu hampir-hampir ditempatkan sebagai representasi tunggal dalam perlawanan. Sebaliknya mereka yang masuk dalam sistem politik yang disediakan oleh pemerintah ditempatkan sebagai representasi tunggal dari mereka yang berkolaborasi dengan pemerintah. Ketika terjadi perpecahan di kalangan gerakan pembebasan atau separatis maka akan terjadi dualisme representasi masyarakat Muslim. Kelompok-kelompok baru tersebut cenderung mengabaikan perbedaan kelompok politik dan bahkan suku serta latar belakang pemahaman keagamaan jika terjadi perbedaan. Dalam suara-suara yang bersifat publik misalnya mereka tampak bersatu meskipun memiliki latar belakang organisasi dan pemahaman keagamaan yang berbeda. Dengan demikian, munculnya kelompok-kelompok baru juga memunculkan pluralitas yang asli dari masing-masing masyarakat di wilayah tersebut yang selama ini tertutupi karena penyeragaman internal di antara mereka.²⁴

Meski demikian, tampak bahwa sejak meningkatnya kekerasan tahun 2004, ada perubahan signifikan dalam gerakan yang lebih bersifat publik dan terbuka yang kian menguat, meskipun tidak menghilangkan sama sekali kelompok-kelompok separatis atau gerakan pembebasan yang bervariasi. Sejak itu pascademonstrasi 2007 muncul fenomena gerakan mahasiswa yang menonjol yaitu tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat sipil atau sering disebut *Civil Society Organization* (CSO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang marak dalam berbagai bidang kehidupan.

Sejarah mencatat bahwa definisi *Civil Society* sangatlah beragam. Para ahli mendefinisikannya dengan kalimat yang beragam meskipun merujuk pada satu maksud yang sama. Sebagian ahli mengatakan bahwa *Civil Society* adalah “masyarakat madani” maupun “masyarakat kewarganegaraan” bahkan ada yang menerjemahkan secara bebas bahwa *Civil Society* adalah “masyarakat sipil”. Salah

²³ Leif Manger, ed. “*Muslim Diversity, Local Islam in Global Contexts*”, (Surrey Great Britain: Curzon Press, 1999), 1-28. Lihat juga Zulfar Hirji, “*Debating Islam from Within: Muslim Constructions of the Internal Other*,” dalam Zulfar Hirji, ed. “*Diversity and Pluralism in Islam: Historical and Contemporary Discourses among Muslims*”, (New York, I.B. Tauris & Co. Ltd., 2010), hlm. 25-29.

²⁴ Ahmad Suaedy, “*Dinamika Muslim Mencari jalan Damai: Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan*”, (Jakarta: The Wahid Institute, 2012), hlm. 119.

satu tokoh politik dan pemikir dari Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa peran dan fungsi *Civil Society* adalah berbeda dengan lembaga-lembaga Negara. Lebih lanjut Ibrahim mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur, berprinsip moral serta menyeimbangkan kebebasan individu dan kestabilan masyarakat. Dan masyarakat madani mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu; kemajemukan budaya (*multicultural*), hubungan timbal balik (*reciprocity*), serta sikap saling menghargai.

Masyarakat Madani sebagai bagian dari komunitas yang berproses untuk menciptakan dan menghadirkan peradapan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara secara kontinyu harus mengacu pada nilai-nilai kesepakatan bersama untuk membangun ikatan sosial, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara. Oleh karenanya, pelaksanaan serangkaian ide yang mendasari masyarakat madani harus memerhati hal-hal yang prinsipil seperti moralitas, keadaban, keadilan, kesamaan, dan demokrasi.

Konsepsi Anwar Ibrahim sejati merupakan pengembangan dari diskursus konsepsi dan model gerakan *Civil Society* yang berkembang di Negara-negara Barat sejak abad ke-17. Di Negara-negara Barat, istilah *Civil Society* muncul karena adanya dominasi dan otoriterian dalam praktik kekuasaan oleh penguasa Negara yang otoriter, memaksa masyarakat untuk menyusun kekuatan dalam rangka melakukan perebutan atas sebuah dalam praktik bernegara. Pada perkembangannya, konsepsi *Civil Society* di Negara-negara barat (terutama Eropa Barat) mengalami proses diminasi dan pasang surut pada tataran praksis. Selain itu, kelompok-kelompok masyarakat dinegara tersebut juga telah berupaya mendorong terciptanya pergerakan sosial yang berbasis pada solidaritas.

Konsep *Civil Society* merupakan hasil “*ijtihad*” para pemikir Barat melalui proses yang sangat panjang. Walaupun demikian, hingga kini kesepakatan tentang pengertian *Civil Society* belum juga terbentuk. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial. Namun yang masih perlu diperjelas adalah gejala sosial diluar gerakan sosial itu apa saja? Sehingga kita dapat mempunyai peta dan mengetahui apakah sesuatu itu dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial atau tidak. Hal yang penting adalah pada gerakan sosial yang

seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil. Seperti yang kita ketahui seringkali ada pembagian ranah antara negara (*State*); perusahaan atau pasar (*Corporation* atau *Market*) dan masyarakat sipil (*Civil Society*).

Berdasarkan pembagian ini maka terdapat pula gerakan politik yang berada di ranah negara dan gerakan ekonomi di ranah ekonomi. Pembagian ini telah dibahas juga oleh Sidney Tarrow yang melihat *political parties* berkaitan dengan “gerakan politik” yakni sebagai upaya perebutan dan penguasaan jabatan politik oleh partai politik melalui pemilu. Sementara itu gerakan ekonomi berkaitan dengan lobi dimana terdapat upaya melakukan perubahan kebijakan publik tanpa berusaha menduduki jabatan publik tersebut.²⁵

Sementara soal konflik dalam pandangan John Burton, studi konflik memiliki dua fokus perhatian yaitu *pertama* menjelaskan gejala konflik dan kekerasan di dalam masyarakat dan masyarakat dunia, guna menemukan pendekatan konstruktif untuk memecahkannya; *kedua*, memberikan penjelasan terhadap permasalahan konflik, untuk menemukan prinsip-prinsip dari proses dan kebijakan yang diturunkan dari suatu penjelasan mengenai konflik. Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan mereka.²⁶

Peran *Civil Society Organization* banyak perdebatan yang dijemputkan kalangan yang mengikuti situasi dan keadaan untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan di Patani. Apakah instansi pemerintah baik birokrasi maupun aparatur pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab untuk misi dan dasar kebijakan di Patani. Dalam seminar maupun laporan akademik dari beberapa CSO, dalam proyek sumbangan dana oleh NGO Internasional, maupun deklarasi dari gerakan BRN yang menuntut kebebasan kemerdekaan, termasuk juga proses dialog perdamaian yang mencoba melakukannya secara rahasia juga tidak dapat hindari

²⁵ Luthfi J. Kurniawan, Hesti Puspitosari, “*Negara, Civil Society & Demokrasi*”, (Malang: Intrans Publishing, 2012), hlm. 19.

²⁶ Moch Nurhasim, “*Konflik dan Integrasi Politik*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hlm. 27.

dari titik perhatian dari aktor penting.²⁷ Yang mengembang dari pemikiran demokrasi bersyura atau perbincangan mencari jalan keluar (*Deliberative Democracy*) supaya memanfaatkan dalam membina suasana bergotong royong bagi setiap pihak dan diterima oleh semuanya lagi akan dapat membantu menuju kearah tahap perdamaian.²⁸

Dengan adanya pengertian itu maka sebuah gerakan politik bisa berubah dari keras menjadi lunak dan sebaliknya tergantung berbagi faktor yang melingkupinya, bahkan perbedaan antara identitas particular seperti identitas budaya lokal dan agama dengan identitas universal bukan tidak mungkin terjadi suatu titik temu. Dengan optimitis bahwa tercapainya titik temu partikulasritas dan universal seperti ini merupakan suatu capaian demokrasi yang lebih tinggi.²⁹ Sebenarnya, pandangan umum tentang gerakan sosial hanyalah sebatas pada kepentingan ideologi dan kepentingan pragmatis. Disinilah sebenarnya titik krusial bagi masyarakat sipil dalam mengambil perannya.³⁰

Karena konflik dan kekerasan di Patani tidak hanya pada dataran kepentingan politik melainkan berakar pada historis dan etnisitas dengan identitas kultural, maka usaha untuk mencari jalan damai harus pula mencari penyelesaian dan titik temu pada dataran tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana organisasi atau individual yang mencari jalan damai itu membangun konsep harmonisasi kultural, termasuk agama, bahasa, dan klaim historis atas tanah serta menegosiasikan kepentingan politik di antara mereka sendiri, antara Muslim minoritas dengan penduduk mayoritas serta pemerintah pusat negara tersebut?

Sedangkan *Civil Society* di Patani sejumlah fenomena penting dalam gerakan sedang aktif di lapangan tersebut “Jaringan Organisasi Masyarakat (Melayu Patani) untuk Perdamaian atau (*Patani-Malay*) *Civil Society Network for Peace*”³¹ adalah

²⁷ Muhammad Ayub Pathan, “*Arsip Laporan: Masyarakat Sipil dan Proses Perdamaian*”, (Pattani: Deep South Waath, 2012), hlm. 1.

²⁸ Jaringan Panduan Suara Menuju Kedamaian, “*Cabaran Suara dari Kampung; Himpunan Pengesyulran dan Perbincangan Menuju Kearah Kedamaian*”, (versi Melayu Jawi), (Bangkok: The Asia Foudatian 2012), hlm.14.

²⁹ Ahmad Suaedy, “*Dinamika Muslim Mencari jalan Damai: Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan*”, (Jakarta: The Wahid Institute, 2012), hlm. 7.

³⁰ Luthfi J.Kurniawan & Wawan S. Fauzi, “*Negara, Civil Society & Demokrasi*”, (Malang: Intrans Publishing, 2012), hlm. 108.

³¹ Khususnya di Patani *Civil Society Organizations* (CSO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adanya 2 organisasi payung (*umbrella organization*) secara besar-besaran sebagai badan induk di antaranya

aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial.

Gerakan sosial-politik dapat bekisar disekitar satu masalah atau dari rerangkaian isu permasalahan maupun sekitar timbunan menarik keprihatinan bersama dari sekelompok sosial. Berbeda dengan partai politik, gerakan politik tidak terorganisir dan memiliki keanggotaan, bukan pula gerakan pada saat pemilu atas jabatan politik pada kantor-kantor pemerintah akan tetapi lebih merupakan gerakan politik yang berdasarkan kesamaan dalam kesatuan pandangan politik untuk tujuan tertentu antara lain untuk meyakinkan atau menyadarkan publik atau masyarakat termasuk pula para pemerintahan untuk mengambil tindakan pada persoalan dan masalah yang merupakan fokus penyebab dari gerakan tersebut.

Studi ini tidak mengembangkan parameter untuk menganalisis hasil kerja kalangan LSM dalam penguatan *Civil Society* di Patani. Karena itu, dibutuhkan studi lebih lanjut untuk menilai efektifitas hasil kerja kalangan LSM, sebagai komponen penting *Civil Society*, dalam penguatan *Civil Society* memprosesi perdamaian. Sehingga, nantinya akan diketahui sejauh mana kondisi *Civil Society* di Patani, dan sejauhmana pula *Civil Society* bisa menjadi fondasi yang kuat bagi terbangunnya tatanan kehidupan yang perdamaian dan berkeadilan yang hakiki.

Civil Society Network for Peace adalah wadah kombinasi dari organisasi masyarakat sipil di Patani. Sebagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran sosial solidaritas terhadap penderitaan masyarakat yang tinggal di zona konflik akibat kematian dengan senjata melalui “perang asimetris” antara ideologi nasionalisme Thailand dengan ideologi nasionalisme Melayu Patani. Struktur beton konflik yang dapat diterima semua pihak adalah bahwa antara pemerintah Thailand dengan gerakan BRN. Pendekatan *Civil Society Network for Peace* lebih berorientasi perdamaian Patani dengan prosesi partisipasi masyarakat berdasarkan prinsip-

pertama; adalah “Dewan Badan Masyarakat Madani Selatan Thailand atau *Civil Society Council of the Southernmost Thailand*”, yang telah dirikan 20 Agustus 2011 dan yang *kedua*; “Jaringan Organisasi Masyarakat (Melayu Patani) untuk Perdamaian atau (*Patani-Malay*) *Civil Society Network for Peace*” telah dibentuk pada 7 Juni 2013. Kedua-dua tersebut masing-masing berbedanya garis strategisnya dan mempunyai organisasi jaringan dibawah induk dengan basis tertentu.

prinsip demokrasi dan menghormati HAM internasional. Kemauan politik rakyat seperti yang diungkapkan oleh agen mereka tidak memiliki tekanan atmosfer kekerasan di kalangan penegak hukum istimewa Undang-undang Keadaan Darurat mengendalikan situasi perang asimetris oleh pemerintah. Adapun akhir dari perdamaian terkait erat dengan kebutuhan warga. Sementara perjalanan, jalan menuju perdamaian tidak akan mampu menghindari dampak ancaman perang asimetris tersebut. *Civil Society Network for Peace* memiliki peran yang berbeda, kampanye untuk mencegah dan untuk bersikap adil terhadap warga yang telah dipengaruhi oleh situasi perang asimetris tersebut.³²

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam situasi konflik dan kekerasan yang disebabkan oleh perbedaan identitas, antara minoritas dan mayoritas, pun bukan tidak mungkin untuk menegosiasikan kepentingan politik, agama, dan budaya hingga terbangunnya titik temu identitas untuk perdamaian. Dalam kaitan ini agama juga bisa memiliki peranan penting di dalam membangun titik temu, khususnya ketika kelompok dan perorangan di dalam agama itu melakukan usaha-usaha untuk itu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam menjadi fokus penelitian ini bahwa; Sejauhmana peran *Civil Society Network for Peace* dalam proses perdamaian melalui aktivitas yang dilakukan terhadap konflik di Patani.?

Penelitian ini hendak mencari faktor-faktor dan usaha-usaha titik temu serta penyelesaian konflik baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok di dalam masyarakat Muslim Patani. Dengan kata lain, penelitian ini hendak mencari jawaban dari pertanyaan, bagaimanakah peranan kelompok masyarakat sipil (*Civil Society*) Malay-Muslim dalam melakukan usaha membangunkan proses perdamaian dalam penyelesaian konflik di Patani.

³² Dokumentasi; *Malay-Patani Civil Society Network for Peace* yang diambil pada tanggal 10 Desember 2015.

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

Seperti diketahui bahwa baik konflik di Patani terdapat berbagai gerakan pembebasan atau kelompok separatis yang berbeda-beda yang memiliki karakter perjuangan politik untuk suatu tujuan, apakah itu merdeka atau otonomi. Namun di sisi lain, akhir-akhir ini juga tumbuh kelompok *Civil Society* dan perorangan yang cenderung mengambil jarak dari gerakan pembebasan atau kelompok separatis tersebut dalam memperjuangkan aspirasi kaum Muslim di wilayah tersebut. Mereka melakukan penguatan masyarakat melalui berbagai strategi dan aktivitas dengan kemuncaknya dengan prinsipel “hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*)”.

Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan problem dan solusi konflik di Patani. Dan kegunaan penelitian secara teoritis penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan tujuan dan misi akademis guna menjawab masalah sesuai secara teoritisnya. Secara praktis, diharapkan menjadi sumber informasi pengetahuan sebagai alternatif dan bahan acuan oleh peran organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan kepada masyarakat Patani maupun masyarakat umumnya paling tidak *Civil Society Global*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini juga perlu sedikit membedahkan terhadap hasil penelitian bahasan subyek yang hampir sama pada penelitian sebelum ini. Aktivist asal Indonesia Ahmad Suaedy, penelitian ini berasal dari sebuah tesis yang membahas masyarakat Muslim di Thailand Selatan (Patani) dan Filipina Selatan (Mindanao) dalam mencari jalan damai dari konflik berkepanjangan dengan pemerintah dan mayoritas di negara tersebut. Walaupun separatisme masih ada, namun upaya negosiasi terus dilakukan oleh masyarakat sipil ini. Ciri-ciri mereka adalah bersifat netral, mengambil jarak dengan separatis, namun tidak memutus komunikasi menjadi representasi dalam upaya perdamaian dengan pemerintah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa berbagai organisasi *Civil Society* di kedua wilayah Muslim itu cenderung mengambil jarak atau bersikap imparisial dari kelompok-

kelompok politik yang terpolarisasi antara kelompok yang menempuh jalan separatisme dan kelompok yang mengutamakan integrasi. Namun demikian, organisasi-organisasi itu tetap membawa aspirasi yang bersifat substantif, seperti aspirasi pengelolaan sendiri sumber daya alam dan usaha membangun pemerintahan sendiri (*self-government*). Penguatan peran *Civil Society* dalam resolusi konflik itu berjalan seiring dengan proses globalisasi, yang pada gilirannya menunjukkan fenomena yang paradoks.³³

Don Pathan, penelitian manajemen konflik di Asia dengan fokus kajian peran *Civil Society* di Thailand Selatan yang mendapat dukung bantuan dana dari *The Asia Foundation* dengan tulisannya membahaskan kelompok persenjataan bagi gerakan pembebasan. Namun pada waktu itu tidak begitu banyak CSO yang mengambil peran atas sikap bertanggungjawab oleh karena kondisi sewaktu itu mungkin tidak aman pada semua daerah semakin menjadi zona konflik seluruhnya malah menambah undang-undang istimewa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atas kestabilan negara.³⁴

Ramadon Panjor, sebuah tulisan "*PPP; Pa(t)tani Peace Process in ASEAN Context*", tulisan buku ini merupakan hasil dari aktivitas forum PPP; Proses Perdamaian Patani konteks ASEAN, yang oleh kerjasama beberapa CSO yang bersifat akademis dan diselenggara oleh *Deep South Watch* sebuah pusat pengamat konflik yang berbasis di PSU Pattani, buku ini juga banyak sekali yang membahas peluang dan kesempatan politik, taktik secara langsung dengan Perdana Menteri, berupakan gerakan perlawanan, proses perdamaian, menjawab soal fakta ketidakadilan. Dari hasil tulisan ini dapat mengumpulkan berbagai aktivis perdamaian dari luar negeri mereka juga dianggap berpengalaman pada daerah bekas pascaperang. Kesimpulan tulisan ini dapat memberi gambaran kedua titiknya antara akar akibat konflik dan proses perdamaian, justru kondisi politik bagi pemerintah tidak begitu respons baik oleh karena masih kegelapan setiap pihak namun dasar kebijakan pemerintah pusat juga mengutamakan militan memimpin politik lebih daripada politik yang memimpin militer, oleh karena dasar ruang bagi

³³ Ahmad Suaedy, "*Dinamika Muslim Mencari jalan Damai: Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan*", (Jakarta: The Wahid Institute, 2012).

³⁴ Don Pathan, "*Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand's Deep South*", (Bangkok: The Asia Foundation, 2012), (Bahasa Inggris dan Thailand).

publik belum terbuka secara luas dan sebaliknya di lapangan rakyat masih belum berani dan belum terasa aman dan terbiasa. Dengan sikap dan peran, fungsi CSO tidak begitu banyak aktif di lapangan kebanyakan masing-masing mengempowermen diri masing-mungkin kekurangan ilmu pengalaman dalam keahlian lalu menjadi kelemahan pada CSO tersebut.³⁵

Karya tulisan Abdulghani Setea, penelitian ini merupakan sebuah kajian untuk memperjelaskan makna di sebaliknya makna *Civil Society* di Thailand Selatan, yang lebih mendefinisikan sebagai “Masyarakat Madani”. Cukup banyak menceritakan peran dan fungsi CSO secara terinci bahwa pentingnya dalam menghadapi dan cabaran di dalam keadaan konflik dan selalu mengangkat taraf sesuatu kewarganegeraan upaya aktif partisipasi berpolitik terhadap pemerintah pusat di Bangkok melalui konsep syura atas nama “Dewan Badan Masyarakat Madani Selatan Thailand atau *Civil Society Council of the Southernmost Thailand*” dengan tujuan penting untuk mencari titik ketemu antara pelaku bagi aktivitas bersenjata kedua-dua pihak yaitu pemerintah dengan gerakan dengan solusi penyelesaian konflik adalah politik dan pemerintah harus bersifat sistem desentralisasi ataupun otonomi sebagai menawarkan atas kesepakatan pada kalangan yang aktif pada jaringan tersebut.³⁶

Sebuah penelitian Ayub Pathan, tentang dinamika *Civil Society* dalam perkembangan kedudukan awal CSO, dengan fokus kajian yang berbasis pada “Dewan Badan Masyarakat Madani Selatan Thailand” badan ini hanya menjelaskan ideal *Civil Society* yang beda pada konteksnya, keadilan, hak-hak dasar jaminan atas perdamaian dan peran yang harus dilakukan, sekaligus perencanaan data-data informasi bagi CSO dan strategi, peran dan sumberdaya dan modal sosial (*social capital*), serta pembahasan dalam mengadakan ruang tuntutan untuk menawar kepada pemerintah sebagai dari pokok akar konflik pada berbedanya konteks antara masyarakat Thailand dengan masyarakat Patani, perbandingan *Civil Society* di dunia Melayu dan dunia Islam dan terakhir adalah Islam dan *Civil Society* yang

³⁵ Ramadan Panjor, “PPP: Pa(t)ani Peace Process in ASEAN Context”, (Pattani: deepbooks, 2013), (Bahasa Thailand).

³⁶ Abdulghani Setea, “Role of Civil Society and the Future of Islamic Civil Society in Solving the Southern Border Provinces”, Jurnal Perspektif Asia oleh Institute Studi Asean di Universitas Chulalongkorn Bangkok, 2011. (1 Dekade Konflik Patani, [edisi 2 tahun 34 Juli-Desember 2011] hlm. 93-137, (Bahasa Thailand).

akan membahas bagaimana sikap pemahaman bagi kaum minoritas Muslim pada status kenegaraan mayoritas Buddha pada era globalisasi untuk mengadopsi Islamisasi dengan waktu yang sama pada kondisi konflik berkepanjangan ini.³⁷

Kajian tesis oleh Apichaya O-in telah membahas fungsi organisasi masyarakat sipil lokal khusus tingkat lapangan yang mendapatkan bantuan dana dari beberapa LSM nasional dan INGO asing dalam menguatkan hak-hak sipil dapat mengembangkan secara mendalam hingga masyarakat desa mampu secara kelimuan dan secara praktisi terhadap situasi konflik dalam rangka jangka panjang masyarakat desa mampu membela secara mandiri dan tidak hanya menjadi alat politik bagi pemerintah maupun gerakan dan lebih mengarahkan keterbukaan ruang publik dalam proses demokratisasi dan perdamaian.³⁸

Romadon Panjor, penelitian gagasan wacana kata-kata politik (*politics of words*) dalam konflik yang telah menemukan bahwa negara Thailand berhasil dalam mencegah konflik dengan mendefinisikan dengan menentukan kata-kata nama yang penting dalam dinamika konflik. Namun pemerintah tidak dapat sepenuhnya dalam mengontrol arti dari kata-kata pilihan mereka, karena bertentangan oleh para pemangku kepentingan lainnya. Dengan munculnya dialog perdamaian, berbagai kata telah diperebutkan yang pada gilirannya mengakibatkan pemeriksaan ulang belum pernah terjadi sebelumnya dari ideologi politik dan strategi konflik dengan pihak yang terlibat. Akibatnya, kontestasi kata-kata ini dan artinya mempengaruhi bagaimana konflik ini, sekali didominasi oleh kekerasan, telah berubah menjadi lebih konstruktif. Dengan perjalanan proses dialog perdamaian menuju bentuk, kata-kata aneh terutama “Pa(t)tani” mengungkapkan wajah konflik mematikan yang merupakan isu “kepemilikan” berdasarkan basis legitimasi yang berbeda. Melihat wajah seperti itu memungkinkan untuk membayangkan masa depan alternatif yang berarti dalam terlibat dengan konflik bagi masyarakat.³⁹

³⁷ Muhammad Ayub Pathan dkk, “*Civil Society dalam Proses Perdamaian; Laporan Riset status kedudukan Organisasi Civil Society di Thailand Selatan*”, (Pattani: Deep South Watch, 2012), (Bahasa Thailand).

³⁸ Apichaya O-in, “*Partnership of International Funding Agencies and Civil Society Organizations in Peace Process in Southern Border Provinces of Thailand*”, (Bangkok: Chulalongkorn University, 2012). (Kajian Tesis ini tidak diterbitkan).

³⁹ Romadon Panjor, “*Politics of Words in Pa(t)tani: Constructing “Peace” in Ethnopolitical Conflict*”, in *Thesis for Master of Arts (Political Science)*, (Bangkok: Thammasat University, 2015), hlm. iii., Bahasa Thailand (Kajian Tesis ini tidak diterbitkan).

Kajian ini berbeda dengan penelitian dari buku-buku di atas, penelitian ini menelusuri usaha-usaha untuk menyelesaikan konflik dan penciptaan perdamaian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok *Civil Society* dan individu yang relatif independen dari pemerintah maupun gerakan nasionalis dengan usaha menjawab kebutuhan warga sebagai menginspirasi “politik identitas” dan “hak politik” melalui “hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*)” sebagai jalan keluar problem konflik dari politik antaretnis sebagai inti dari perdamaian.

E. Kerangka Teoritis

Dalam upaya mengungkap relasi peran organisasi masyarakat sipil (*civil society*) dengan pemerintah (*state*) dalam proses perdamaian di Patani, yang berupaya meraih kekuatan aksi, penulis membagi ke dalam dua premis sebagai alat pembedah. *Pertama*, kekuasaan harus dilihat sebagaimana yang ditemukan Max Weber, yang merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendak pada pihak lain walaupun di dalamnya ada penolakan-penolakan. *Kedua*, bekerjanya penolakan-penolakan dalam premis pertama dipandang, sebagai sebuah relasi, yang berbentuk responsif. Tindakan responsif dapat berupa strategi-strategi atau siasat, kedua premis yang telah disebutkan itu dibedah melalui proses pembedahan yang menggunakan teori dari Talcott Parsons, yakni *Functionalism Theory* (Teori Fungsionalisme Struktural).

Talcott Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Pendekatannya selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto dan Max Weber. Hal tersebut di ataslah yang menyebabkan Teori Fungsionalisme Talcott Parsons bersifat kompleks.⁴⁰

Secara sederhana, fungsionalisme struktural adalah sebuah teori yang pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada model sistem organik dalam

⁴⁰ Talcott Parsons, *The Structure of Sosial Action*, (New York: McGram-Hill, 1937) dan lihat juga Johnathan H. Turner, Alexander Maryanski, *“Fungsionalisme”*, Terj. Anwar Efendi, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 121.

ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Hubungan terjadi ketika manusia memasuki pola interaksi yang relatif stabil dan berkesinambungan atau saling ketergantungan yang menguntungkan. Maka pola struktur sosial dapat dipengaruhi oleh jumlah orang yang berbeda-beda, kedudukan seseorang dan peran yang dimiliki individu dalam jaringan hubungan sosial. Perlu dipahami bahwa struktur sosial merupakan lingkungan sosial bersama yang tidak dapat diubah oleh orang perorang. Sebab ukuran, pembagian kegiatan, penggunaan bahasa, dan pembagian kesejahteraan didalam organisasi merupakan pembentuk lingkungan sosial yang bersifat struktural dan membatasi perilaku individu dalam organisasi.

Teori “Fungsionalisme Struktural” oleh Parsons mengungkapkan suatu keyakinan yang optimis terhadap perubahan dan kelangsungan suatu sistem. Akan tetapi optimisme Parson itu dipengaruhi oleh keberhasilan Amerika dalam Perang Dunia II dan kembalinya masa kejayaan setelah depresi yang parah itu. Bagi mereka yang hidup dalam sistem yang kelihatannya mencemaskan dan kemudian diikuti oleh pergantian dan perkembangan lebih lanjut maka optimisme teori Parsons dianggap benar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gouldner “untuk melihat masyarakat sebagai sebuah firma, yang dengan jelas memiliki batas-batas strukturalnya, seperti yang dilakukan oleh teori baru Parsons, adalah tidak bertentangan dengan pengalaman kolektif, dengan realitas personal kehidupan sehari-hari yang sama-sama kita miliki”.

Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Dalam teorinya, Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Dwi Susilo, Rahmat K, komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya.

Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan.⁴¹

Dan juga “Teori Aksi” atau “*Action Theory*” yang juga dikenal sebagai teori bertindak ini pada mulanya dikembangkan oleh Max Weber seorang ahli sosiologi dan ekonomi yang ternama. Max Weber berpendapat bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsirannya atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu. Tindakan individu ini merupakan tindakan sosial yang rasional, yaitu mencapai tujuan atau sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat. Teori Weber dikembangkan lebih lanjut oleh Talcott Parsons, yang mulai dengan mengkritik Weber, menyatakan bahwa aksi atau *action* itu bukanlah perilaku atau *behavior*. Aksi merupakan tanggapan atau respons mekanis terhadap suatu stimulus sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan kreatif.

Menurut Parsons, yang utama bukanlah tindakan individual, melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menuntun dan pengatur perilaku. Kondisi obyektif disatukan dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai akan mengembangkan suatu bentuk tindakan sosial tertentu. Parsons melihat bahwa tindakan individu atau kelompok dipengaruhi oleh 3 sistem, yaitu sistem sosial, sistem budaya dan sistem kepribadian masing-masing individu. Kita dapat mengaitkan individu dengan sistem sosialnya melalui status dan perannya. Dalam setiap sistem sosial individu menduduki suatu tempat atau status tertentu dan bertindak atau berperan sesuai dengan norma atau aturan yang dibuat oleh sistem tersebut dan perilaku individu ditentukan pula oleh tipe kepribadiannya.⁴²

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, untuk dapat mengungkap lebih dalam pandangan dari berbagai kelompok maka peneliti berusaha untuk bertemu dan melakukan wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang terlibat, para pemimpin

⁴¹ George Ritzer, Douglas J. Goodman, “*Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 259.

⁴² *Ibid.* hlm. 263.

dan tokoh yang berbeda-beda dan menginformasikan yang dianggap lebih netral. Peneliti juga melakukan kroscek aktor-aktor yang terlibat langsung atau fokus terhadap perilaku para aktor yang terlibat dan alasan-alasan rasional yang mendasarinya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pandangan sosial politik mereka. Sedangkan penguasaan data dan analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Deskriptif dalam arti menguraikan secara apa adanya secara kronologis terhadap temuan-temuan dalam penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan struktur uraian yang direncanakan. Analitis dalam arti data tersebut dikaitkan satu dengan yang lain dan ditarik kesimpulan.

Metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, metode ilmiah adalah suatu kerangka landasan yang diikuti bagi terciptanya pengetahuan akademika.⁴³ Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji, suatu pengetahuan serta usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pertimbangan penggunaan metode ini karena data yang diteliti berupa kata-kata tertulis atau lisan bukan perhitungan.

Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah *pertama*; Obyek Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah peran organisasi masyarakat sipil dalam proses perdamaian dari konflik di Patani keikutsertaan bergerak bersama masyarakat sekaligus memobilisasi masyarakat. Hal ini cukup menarik untuk diteliti ketika sebuah organisasi masyarakat sipil yang bisa berperan dengan baik dalam mengembangkan masyarakat setempat tidak hanya dalam hal sosial-politik. *Kedua*; Subyek Penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat langsung atau fokus terhadap perilaku para aktor yang terlibat dan alasan-alasan rasional yang mendasarinya, baik secara organisasi maupun individu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pandangan sosial-politik mereka, yang ikut serta dalam penelitian di mana data akan dikumpulkan.⁴⁵ *Ketiga*; Sumber Data utama dalam penelitian

⁴³ Dudung Abdrrahman, "Pengantar Metode Penelitian", (Yogyakarta: Kumia Kalam Semesta, 2003), hlm.1.

⁴⁴ Lexy J.Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 43.

⁴⁵ Ibnu Hajar, "Dasar-dasar Penelitian dalam Pendidikan", (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 133.

kualitatif ialah berupa kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.

Sedangkan koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang cari harus sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan teknik sampai paling yang benar sudah mendapatkan strategi dan prosedur yang akan digunakan dalam mencari data di lapangan. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan penulis bersumber dari informan yang terbagi menjadi dua yaitu pertama ialah data primer (*primary data*) dan yang kedua ialah sekunder data (*secindary data*). Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai⁴⁶ tentang sejauhmanakah peran *Civil Society* dalam proses perdamaian mengembangkan masyarakat di Patani serta hal-hal lain yang masih terkait dengan pokok penelitian dari beberapa nara sumber yang telah ditentukan. Dan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung memberikan data yang biasanya berupa data dokumentasi atau arsip-arsip resmi kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian,⁴⁷ selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

Pendalaman literatur yang memakan waktu hampir tiga bulan sebelum ke Patani. Sedikit untungnya dengan kebetulan bahwa peneliti dapat memimpin jalani survei bagi para aktivis *Ansaar International e.V.* dari Jerman yang ingin mengunjungi ke Patani. Studi lapangan untuk penelitian ini dilakukan di Patani, dibagi dalam beberapa fase. Fase pertama adalah sekitar satu bulan pada pertengahan bulan Mei sampai petengahan Juni 2016. Selama tinggal di lapangan ini, penulis bertemu dan melakukan wawancara mendalam dengan para aktivis-

⁴⁶ Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian", Cet II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 36.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 37.

aktivis, tokoh masyarakat, agama, politik kalau pun tidak semua, banyak faksi yang ada. Penulis juga melakukan perjalanan di dalam kota, antarkota dan ke perkampungan serta bertemu dengan masyarakat umum, baik bertemu ke rumah mereka yang penulis kenal maupun bertemu di berbagai kesempatan, seperti training, seminar, workshop, dan juga di sekretariat masing-masing maupun warung kopi. Sehingga sambil menuju ke kembali ke Indonesia, penulis sempat pula memanfaatkan literatur dukumen dan arsip perpustakaan di Universitas Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur karena banyak naskah-naskah yang berkaitan dengan Patani tersimpan disini. Penulis kembali ke Yogyakarta untuk melakukan analisis dan langsung menyusun. Namun fase kedua berlaku di sekitar akhir bulan September dengan keterbatasan waktu visa belajar dengan habis masa berlaku sehingga terpaksa harus keluar dari Indonesia maka peneliti kembali ke Patani untuk mengurus visa dan passport yang baru sekaligus dilakukan studi lapangan yang kedua sebagai wawancara kutipan sisa-sisa data yang masih kekurangan dengan selama satu bulan pada bulan Oktober 2016.

Ada beberapa kesulitan yang perlu diungkapkan di sini, yaitu bahwa, ada hambatan dari karakter sosial politik maupun gerakan, serta pengorganisasian di Patani, sehingga pemilihan informan dan tokoh kunci disesuaikan dengan karakter lokal tersebut. Di samping karena faktor lokal juga disebabkan karena pendekatan dan sikap pemerintah pusat misalnya lebih represif ketimbang terhadap kelompok-kelompok yang dianggap separatis, sehingga para pemimpin pembebasan atau separatis pada umumnya bersembunyi dan melakukan gerakan *underground*. Karena itu, peneliti tidak memungkinkan untuk bisa bertemu secara langsung dengan para pemimpin gerakan pembebasan atau separatis. Dan bukan tidak mungkin mereka yang ditemui atau diwawancarai penulis adalah para pemimpin itu sendiri, namun mereka tidak pernah memberi konfirmasi bahwa mereka adalah aktivis atau pemimpin gerakan.

Penelitian ini juga membatasi ruang lingkup terhadap penelitian dengan mempetakan “perjalanan proses penelitian” yang akan memfokuskan beberapa peristiwa perubahan penting (*transformations event*) terhadap aktor-aktor dalam peranan *Civil Society Organizations* (CSO) semenjak awal tahun 2004 hingga ke tahun 2015, penelitian ini juga telah menemui titik suatu perubahan penting atas

kata kunci dari peristiwa perubahan seperti berikut adanya “tiga *statment*” yang menjadi relasi dengan suatu titik perubahan dengan mengikut kondisi dan situasi konflik disamping itu sekaligus dinamika proses perdamaian juga menjadi pasang surut sebagai berikut; *Statment pertama*; Deklarasi perang rakyat semesta di awal tahun 2004 merupakan cetusan manifesto politik “Revolusi Patani” dengan secara gerilya sebagai momentum melawan kolonialisme Siam. *Statment kedua*; Protes aksi massa “Demontrasi 50” pada tahun 2007 di Masjid Jamek Patani oleh gerakan mahasiswa sebagai permulaan keterbukaan ruang aktif kalangan aktivis LSM dalam penguatan *civil society* untuk perdamaian dan HAM. *Statment ketiga*; Penandatngani pada 28 Febuari 2013 dengan upacara “Konsensus Umum Proses Dialog Damai (*General Consensus on Peace Dialogue Process*)” atas sepakatan negosiasi politik melalui proses dialog perdamaian antara pemerintah Thailand dengan BRN di Kuala Lumpur, Malaysia yang sering beberapa kali atas pertemuannya namun tidak begitu nampaknya resolusi yang paling terbaik dalam menyelesaikan masalah konflik, karena kondisi pemerintah pusat di Bangkok sedang melanda krisis politik internal sehingga muncul kudeta Thailand pada 22 Mei 2014 merampas kekuasaan kembali pemerintah diktator militer.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan semakin kuatnya peran *civil society* dalam usaha-usaha mencari solusi dari konflik secara damai ketimbang jalan politik yang selama ini perannya dimonopoli oleh aktor-aktor dan gerakan pembebasan atau separatis. Dengan demikian penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pengembangan pengetahuan tentang tren gerakan minoritas dalam suatu negara nasional di masa globalisasi. Secara khusus penelitian ini bertujuan memberi informasi tentang pergulatan minoritas Muslim di Patani dalam usaha menyelesaikan konflik dan mencari jalan damai. Secara akademik penelitian tesis ini diharapkan melengkapi kajian tentang pergulatan minoritas Muslim di sebuah kawasan dan memberikan sumbangan bagi kajian tentang identitas politik dalam masyarakat Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini dibagi dalam lima bab. Diawali dengan *bab kesatu*; pendahuluan yang berisi pendahuluan membahas tujuan, latar belakang dan landasan kerangka teoritis, metodologi penulisan, kajian pustaka dengan akhirnya sistematika.

Bab kedua; tesis ini mengupas definisi dan konsep minoritas muslim dan *civil society* secara teoritik yang meliputi pokok bahasan tentang konsep negara-bangsa dengan memahami konteks minoritas muslim di negara nonmuslim, mengenali sekaligus gerakan minoritas melalui negosiasi politik dalam masa lalu, sekaligus memahami juga aspek sejarah serta konseptualisasi kemunculan *civil society*, meskipun merupakan fenomena modern yaitu gerakan sosial politik dalam *civil society* dari tranfermasi event sehingga keterbukaan ruang demokrasi yaitu politisasi agama melalui jalur politik bagi identitas dalam politisasi bahkan politik pemerintah dengan demokratisasi sentralistik, meskipun diskursus agamanisasi dalam politik yakni Islam sebagai minoritas yang sedang menghadapi pemerintah nonmuslim dan bagaimana karakter *Muslim Society* dibidang dakwah dan pendidikan sekaligus mengenai latar belakang sudut sosial kultural, ekonomi Islam.

Bab ketiga; sebagai fokus perhatian dalam tesis ini atas peranan gerakan *civil society* untuk perdamaian dalam berpolitikan melalui aktivitas CSO yang berada dengan berbagai bidang termasuknya aktivis penegakan hukum dan pembela HAM, aktivis melestari aksara Jawi dalam mempertahankan identitas bangsa agar tidak melenan asimilasi Thai melalui bahasa, serta dinamika budaya Patani pada dimensi ke-Melayu-an, keadilan sosial terhadap opini publik dari aktivis sosial dalam politik, mengenali juga peranan jurnalis lokal dengan media damai, dan peranan aktivis lingkungan dalam melestarian dan mengawasi kekayaan SDA.

Bab keempat; Arah penyelesaian untuk perdamaian dengan merumuskan makna di sebalik makna perdamaian dengan pembahasan yang meliputi; definisi perang dan damai di Pa(t)tani, mengamati respon dari aktivitas negosiasi politik melalui aksi dan kampanye, serta status politik oleh gerakan mahasiswa Patani, dan menawarkan ideal untuk dapat memahami wancana “Melayu-Islam-Patani”, kemudian menganalisa fenomena dialog sebelum negosiasi dari Bangkok ke Kuala Lumpur, dan dinamika peran CSO di Patani Center. Dan terakhir *bab kelima*; penutup merupakan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

Tesis ini membahas tentang peran masyarakat Muslim pada sudut *Civil Society Muslim* di Patani atau Thailand Selatan dalam mencari jalan proses damai dari konflik yang berkepanjangan berhadapan dengan pemerintah pusat Thailand. Fenomena ini sangat penting untuk dilihat karena dalam benak banyak orang terutama yang diekspose melalui media massa, perjuangan mereka untuk menuntut keadilan seolah semata-mata dilakukan melalui kekerasan aparat pemerintah. Dan dengan itu telah menambah kesengsaraan bagi umat Islam di sana dan juga penduduk negara itu. Dengan demikian, dengan menguatnya gerakan *civil society* yang berorientasi perdamaian ini, ada keseimbangan bahwa meskipun gerakan nasionalis atau separatisme sampai sekarang masih ada tetapi hasrat untuk melakukan negosiasi secara damai lebih kuat disuarakan oleh Masyarakat Muslim di sana.

A. Kesimpulan

Patani yang dikenal adalah wilayah yang berpenduduk mayoritas Muslim yang kini menjadi bagian dari negara Thailand. Sudah sejak masa kemerdekaan wilayah ini berkonflik dengan pemerintah pusat Bangkok. Munculnya gerakan *Civil Society* yang menguat untuk perdamaian ini bisa dibilang fenomena baru yang memberi harapan bagi terwujudnya perdamaian lebih kuat.

Ada beberapa ciri penting dari gerakan *Civil Society* tersebut. Di antaranya adalah pertama, mereka sejauh mungkin mengambil jarak dari kelompok-kelompok gerakan nasionalis atau separatistis dalam strategi perjuangannya. Dengan mengambil jarak tersebut, mereka berdiri netral di antara pemerintah pusat dengan kelompok-kelompok gerakan nasionalis atau separatistis sendiri yang seringkali juga saling berbeda aspirasi dan juga antara kaum Muslim di wilayah tersebut dengan pemerintah pusat.

Dengan begitu, mereka bisa berdiri relatif obyektif dan diharapkan bisa dipercaya oleh berbagai pihak. Namun di sisi lain, mereka tidak memutuskan dialog dengan kelompok-kelompok itu dan selalu mengikutkan representasi

mereka dalam berbagai upaya perdamaian. Dengan demikian, posisi netral mereka tidak mengurangi upaya dialog dan saling memahami di antara kelompok-kelompok tersebut.

Ciri berikutnya adalah bahwa tujuan akhir dari gerakan *Civil Society* dalam perdamaian tersebut tidak berbeda dengan berbagai gerakan lain termasuk gerakan nasionalis atau separatisme, yaitu untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Muslim yang notabene minoritas di negara tersebut. Mereka juga menuntut perlakuan politik yang sederajat, pembagian hasil sumber daya alam yang adil serta penghargaan terhadap tradisi dan bahkan *self-government* meskipun menjadi bagian dari negara. Gerakan-gerakan itu hanya dibedakan dalam strategi, yaitu menghindari kekerasan apalagi bersenjata.

Kelompok-kelompok *Civil Society* Muslim itu bekerja melalui advokasi informasi dan *public sphere* termasuk hak-hak berekspresi dan berkumpul, pemberdayaan ekonomi ke luarga termasuk rumah tangga dan perempuan, serta penguatan aspirasi politik masyarakat dan pendidikan.

Kerana problem minoritas masih menjadi tantangan serius bagi negara-negara demokrasi di dunia termasuk di negeri ini. Meningkatnya angka kekerasan terhadap minoritas khususnya berbasis agama dan keyakinan menunjukkan situasi mencemaskan dan membahayakan integrasi bangsa.

Demokrasi tampaknya masih menyisakan soal mengenai perwujudan keadilan bagi kelompok minoritas yang berbeda dirasakan kelompok mayoritas. Demokrasi, bagi sebagian orang, dipandang sebetuk model yang dibangun dari hegemoni mayoritas dan diskriminasi terhadap minoritas. Tuntutan keadilan ini yang selanjutnya melahirkan adanya gerakan menuntut keadilan, dari yang lunak hingga dengan jalan kekerasan dan separatisme menjadi legitimasi atas landasan hak pertuanannya.

Di atas semua itu, akar soal dari relasi mayoritas-minoritas sesungguhnya soal keadilan (*justice*). Maka negara dituntut menemukan konsep, formulasi, dan pengelolaan yang tepat dalam memberikan rasa keadilan dan hak-hak mereka sebagai minoritas dan juga sebagai warga negara.

Dengan cara pandang semacam ini, sudah selayaknya mayoritas di negeri ini betul-betul menghargai dan melindungi minoritas, tidak sebaliknya. Perlindungan terhadap minoritas, sesungguhnya berarti pula perjuangan melindungi dan memperjuangkan hak minoritas muslim di negara tersebut juga di negara-negara lainnya.

Tepat sekali jika penelitian ini mulai menawarkan adanya “penyegaran” konsep Islam terhadap minoritas (*aqaliyyat*). Sejauh ini konsep ini masih membatasi wilayah kajian pada semata-mata umat Islam sebagai minoritas, bukan bagaimana Islam memandang minoritas yang beragam jenis itu.

Di tengah-tengah banyak kendala dan bahkan kemacetan dialog antara Patani dengan pemerintah pusat untuk di satu pihak dicapainya jalan damai diperolehnya hak-hak bagi minoritas, muncul kelompok-kelompok baru yang lahir dari proses penguatan *Civil Society*. Kelompok ini lahir bersamaan dengan era demokratisasi dan globalisasi. Demokratisasi memberikan kesempatan masyarakat lebih luas untuk mengorganisir diri dan merumuskan aspirasi secara mandiri. Mandiri bukan hanya dari pengaruh aktor-aktor pemerintah pusat, elit nasional, birokrasi dan partai politik melainkan juga mandiri dari hegemoni para pemimpin lokal politikus Muslim dan para aktivis yang selama ini memonopoli aspirasi Muslim melalui gerakan nasionalis, misalnya.

Sebagian besar gerakan *Civil Society* tersebut mengambil strategi non-partisan atas kelompok-kelompok gerakan nasionalis yang sudah ada. Mereka lebih menekankan pada penyadaran masyarakat melalui penguatan ekonomi dan artikulasi politik atau *public sphere* ketimbang mobilisasi masyarakat untuk membentuk pasukan dan bersenjata. Mereka memanfaatkan keterbukaan untuk mengungkapkan agenda dan misinya kepada publik baik melalui media massa maupun melalui pengembangan masyarakat secara langsung. Meski demikian tidak berarti mereka selalu lebih akomodatif dan reformis dari gerakan nasionalis. Dalam hal-hal atau aspirasi yang substansial seperti penguasaan tanah atau sumberdaya alam pada umumnya dan hak politik, mereka tidak berkompromi dengan pemerintah pusat.

Karena itu, kedua gerakan ini yaitu gerakan nasionalis untuk pembebasan dan gerakan *Civil Society* cenderung memiliki irisan yang kuat di dalam aspirasi yang bersifat substansial. Tetapi mereka berbeda dalam strategi mencapainya. Kelompok-kelompok *Civil Society* lebih menekankan pada penguatan *public sphere* dan penguatan ekonomi secara langsung. Meski demikian, harus diakui bahwa gerakan *Civil Society* yang cenderung non-partisan belum bisa menggantikan gerakan nasionalis dalam negosiasi-negosiasi dengan pemerintah pusat. Sejauh ini pemerintah pusat masih menekankan perhatiannya pada gerakan nasionalis khususnya BRN meskipun tidak mengabaikan gerakan *Civil Society* tersebut.

Peran *Civil Society* tampaknya menjadi bagian dari gerakan meningkatnya tuntutan penghormatan terhadap minoritas di berbagai negara seiring dengan laju demokratisasi dan globalisasi yang melanda berbagai negara di dunia. Fenomena itu tampaknya memberikan pengaruh terhadap perubahan-perubahan baik terhadap hubungan antara minoritas dengan pemerintah pusat dan mayoritas maupun di antara kelompok-kelompok Islam bagi Muslim Society sendiri sebagai minoritas di negara tersebut. Perubahan itu adalah kian meningkatnya kesadaran akan hak-hak minoritas serta variasi bentuk aspirasi dan gerakan.

Model gerakan nasionalis di satu sisi dan di sisi lain model akomodatif melalui jalur yang dibangun oleh pemerintah pusat dan mayoritas tidak lagi menjadi pilihan hitam putih yang selama ini berujung pada polarisasi gerakan. Pilihan garis tengah berupa gerakan sosial dan keagamaan yang cenderung menempatkan diri non-partisan terhadap kelompok-kelompok politik yang cenderung terpolarisasi di dalam komunitas Muslim sendiri dan juga terhadap usaha okupasi pemerintah pusat, tampak kian menguat.

Kelompok *Civil Society* ini cenderung membawa perdebatan-perdebatan yang selama ini hanya berkisar di lingkaran elit ke dalam ranah masyarakat luas atau *public sphere* dalam bentuk rumusan-rumusan hak yang lebih kongkrit bagi masyarakat *grass-roots*, seperti peningkatan ekonomi keluarga, peran perempuan, kesempatan pendidikan hingga kebebasan untuk berpendapat dan

berorganisasi dan bebas dari rasa takut dan kesewenang-wenangan. Tumbuhnya gerakan sosial yang mencoba mengambil posisi netral secara politik namun tetap mengangkat aspirasi substantif tuntutan keadilan dan kesamaan menampakkan harapan baru bagi tercapainya suatu solusi yang lebih substansial dan damai. Namun, baik bagi gerakan politik di dalam komunitas minoritas Muslim sendiri maupun di dalam pemerintahan pusat, tampaknya model gerakan ini belum memperoleh perhatian seksama. Dengan kata lain, gerakan sosial ini belum dipertimbangkan sebagai representasi Muslim di Patani itu untuk diajak bicara secara langsung dalam berbagai negosiasi perdamaian.

Di sisi lain lagi, seluruh perkembangan di dalam masyarakat minoritas Muslim tampaknya belum diimbangi oleh sistem politik yang kian terbuka di dalam pemerintah pusat, atas hak-hak minoritas yang terimplementasikan di dalam kebijakan politik nasional semisal desentralisasi pengelolaan sumber daya alam dan pemerintahan sendiri bagi minoritas yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau provinsi tertentu. Baik pemerintah Thailand masih bersikukuh pada suatu bentuk pemerintahan yang sentralistik dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan pemerintahan.

Bentuk-bentuk desentralisasi yang diberikan kepada wilayah yang mayoritas Muslim dan pemilihan langsung bagi *Chief Executive*, sebuah jabatan di bawah posisi Gubernur di tiga wilayah Thailand Selatan, belum memberikan implikasi bagi desentralisasi yang bersifat substantif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pemerintahan tersebut. Dua bentuk tersebut seperti hanya meletakkan agen kepercayaan pusat di daerah, namun kebijakan-kebijakan strategis masih berada di tengah pusat.

Situasi ini cukup mengkhawatirkan, karena jika kesadaran dan pemahaman rakyat yang terus meningkat diikuti kemandirian ekonomi politik secara relatif terus meningkat, serta mampu mengekspresikan melalui terbukanya *public sphere*, sementara pemerintah pusat dan mayoritas tidak mengalami perkembangan berarti maka berpotensi terjadinya akumulasi kekecewaan. Selanjutnya, ini akan menghadapkan pemerintah pada pilihan untuk bersikap represif dan kembali ke otoritarianisme untuk mempertahankan

posisi politik dan sentralisasi tersebut. Sikap dan kebijakan seperti itu bukan tidak mungkin akan memancing kembali terjadinya kekerasan.

Dengan kata lain, penelitian ini menemukan bahwa hubungan minoritas Muslim di Patani telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam keterbukaan, baik oleh pemerintah pusat Thailand. Tetapi keterbukaan itu belum cukup untuk mengakomodasi aspirasi substansial masyarakat minoritas Muslim di Patani atau tiga provinsi di Thailand paling selatan. Aspirasi seperti ini sesungguhnya merupakan bagian trend dunia sebagai bagian dari menguatnya posisi minoritas di dalam suatu negara nasional dalam era demokratisasi dan globalisasi. Karena itu, diperlukan suatu perubahan kebijakan yang bersifat substantif pula bagi negara nasional dan bahkan jika hal itu menuntut adanya perubahan Konsitusi, untuk memberikan tempat bagi aspirasi yang bersifat substantif minoritas Muslim di wilayah tersebut.

Dengan karena berbagai-bagai jalan buntu politik yang dialami oleh Muslim di Patani telah memunculkan kelompok-kelompok baru yang kreatif untuk mencari jalan keluar terjadinya perdamaian. Meskipun tidak mudah, bukan hanya dalam menghadapi pemerintah pusat dengan segala kepentingan mayoritas tetapi juga menghadapi perbedaan-perbedaan di dalam komunitas Muslim itu sendiri dan juga antara kalangan Muslim dengan Non Muslim. Mereka tampaknya lebih hendak membawa diskusi dan perjuangan ke arah substansi ketimbang simbolik seperti slogan merdeka atau bahkan otonomi. Kepada publik mereka mencoba mengangkat tema-tema yang bersentuhan langsung dengan substansi aspirasi masyarakat seperti hak pengelolaan tanah dan hak berorganisasi dan untuk mendapatkan informasi dan menyatakan pendapat. Kepada masyarakat, mereka melakukan penguatan kesadaran dan pengetahuan politik, kesadaran, kecintaan dan usaha pelestarian budaya sendiri, serta penguatan ekonomi dari berbagai sudut, mulai dari ibu rumah tangga hingga penguasa kecil dan menengah. Semua itu dilakukan tanpa memerlukan suatu organisasi besar dengan mobilisasi massa seperti terjadi pada kelompok gerakan nasionalis atau separatis.

Mereka juga mencoba mendayagunakan berbagai bantuan dari luar negeri, bukan hanya bantuan finansial melainkan terutama adalah arus informasi dan hak-hak asasi manusia yang memberikan perlindungan kepada mereka untuk bersuara, menulis dan menerbitkan media bahkan aksi-aksi damai, solidaritar secara simbolis. Tidak kalah penting adalah pemanfaatan terhadap sumber-sumber kultural seperti tradisi keagamaan, bukan hanya Islam dan Melayu tetapi juga agama lain yang memungkinkan untuk mengundang simpati dan bahkan kerjasama banyak pihak.

B. Saran

Pada awalnya ada usaha dari minoritas Muslim di wilayah tersebut untuk beradaptasi dengan tuntutan realitas. Meskipun minoritas Muslim di kawasan tersebut semula tidak menginginkan menjadi bagian dari negara-bangsa nasional Thailand tersebut, tetapi telah mencoba realistis dan mengikuti proses politik yang berlangsung sembari berharap dengan sistem tersebut mereka akan memperoleh kemerdekaan dan kemakmuran sebagaimana didambakan oleh banyak warga negara di dalam suatu negara yang merdeka. Namun ideologi nasionalisme yang cenderung fasistik dan *majoritarian* membuat munculnya kebijakan-kebijakan yang bersifat represif atau penyeragaman dan otoritarian, sehingga memunculkan reaksi minoritas dari tuntutan merdeka hingga otonomi dan *ancestral domain*.

Sesungguhnya, secara nasional tidak hanya minoritas Muslim di negara tersebut yang menjadi korban dari karakter kekuasaan di masa itu, melainkan juga minoritas lain seperti *indigenous people*. Tetapi perkembangan internasional dan kesadaran politik dalam negeri telah memberikan keuntungan bagi *indigenous people* yang memperoleh perhatian lebih besar dari berbagai konvensi internasional di bawah PBB, misalnya di bawah judul *ancestral domain*. Sehingga mereka misalnya bisa mengklaim tanah warisan (*ulayat*) sebagai hak mengelola secara penuh dan independen. Sedangkan minoritas nasional secara internasional tampaknya masih dalam perdebatan, apakah

mereka memiliki hak sebagaimana *indigenous people* tentang hak kepemilikan tanah ulayat atau tidak.

Sesungguhnya baik gerakan nasionalis untuk pembebasan atau separatis dan insurgensi maupun pemerintah pusat di negara tersebut telah mengalami transformasi. Dari sudut gerakan maka mereka telah berubah dari tuntutan merdeka ke tuntutan otonomi dan *ancestral domain* maupun ingin menentu nasib sendiri *self-determination*. Demikian juga, pemerintah pusat telah mengalami transformasi dari pendekatan represif dan penyeragaman politik dan budaya kepada strategi yang lebih terbuka dan memberikan anggaran lebih besar ketimbang sebelumnya serta mendesentralisasi politik secara terbatas. Namun, tetap saja kenyataan itu masih sangat terbatas dan bisa dikatakan masih jauh dari aspirasi esensial tuntutan mereka, misalnya penguasaan sumber daya alam dengan pembagian penghasilan dan pajak 75:25 dan pemilihan gubernur langsung oleh rakyat setempat secara mandiri atau *self-government* belum terpenuhi.

Dengan selama ini terbentuknya negara-bangsa di Thailand belum memberikan kesederajatan dalam hak minoritas khususnya minoritas Muslim di bagian selatan negara itu. Dalam rentang sejarah sejak penjajahan dan terbangunnya nasionalisme di negara ini masih menyisakan kesenjangan yang lebar baik secara budaya, agama, dan ekonomi maupun politik. Strategi terbangunnya identitas nasional sebagaimana terjadi di semua negara-bangsa melalui jalan asimilasi maupun represi tidak mampu menghilangkan sekat kultural, tradisi, dan klaim historis atas kekuasaan dan kepemilikan tanah masa lalu komunitas tersebut. Baik asimilasi maupun pemaksaan atas penyeragaman justru terjerembab pada usaha penyeragaman yang bersifat pemaksaan. Akibatnya adalah terjadinya hubungan yang asimetris antara mayoritas atau pemerintah pusat dengan minoritas Muslim di negara tersebut. Baik etnis Melayu yang Muslim di Patani masih terus melakukan negosiasi untuk suatu kemandirian, baik merdeka, otonomi ataupun *self-government* dan ingin menentu nasib sendiri *self-determination*. Tuntutan tersebut bersamaan dengan digugatnya sistem demokrasi liberal dan HAM yang dianggap terlalu

berorientasi kepada hak individu dan cenderung mengabaikan hak kolektif sebagaimana terjadi pada minoritas Muslim tersebut, maupun penduduk asli (*indigenous people*) pada umumnya di tempat lain. Belum bisa dipastikan akhir dari pergulatan itu, namun bersamaan dengan pemberian hak-hak minoritas di banyak bagian dunia yang lain, khususnya Eropa dan perhatian yang lebih besar dari PBB, OKI, ASEAN bahkan NGO Internasional sekalipun diharapkan akan ada perubahan yang signifikan.

Peran proses perdamaian pada dinamika konflik mulai dari sebab-musabab konflik, pasang-surut kekerasan, perbedaan sikap kaum minoritas sendiri dan berbagai macam negosiasi politik upaya perdamaian dan perundingan.

Ada dua hal yang perlu digarisbawahi dari konflik di negara tersebut. Yakni, pertama, asal-muasal konflik adalah kebijakan kekuasaan kolonial dalam hal ini Inggris. Inggris membenarkan dan mendukung pemisahan suku Melayu menjadi dua komunitas. Satu pihak digabungkan dengan Thailand dan pihak lain berada di bawah kolonial Inggris, dan kemudian digabungkan dengan komunitas Melayu lainnya ke dalam negara Federasi Malaysia. Sehingga terjadi pembalikan kuantitas dan kualitas demografi yang mendorong konflik berkepanjangan.

Kedua, konflik di Patani melibatkan unsur agama berhimpitan dengan unsur kesukuan dan kedaerahan. Faktor ini memperumit proses perundingan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik, meskipun berbagai negara ikut membantu mencari solusi. Misalnya pemerintah Malaysia ataupun pemerintah Indonesia membantu penyelesaian Patani dengan Thailand.

Barangkali nilai lebih dari penelitian ini adalah kejelian penulis dengan mengungkap “faktor baru” dalam proses perdamaian, yakni mulai adanya inisiatif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perkembangan baru di Patani ini paralel dengan kecenderungan global di mana LSM semakin aktif mengambil peranan dalam perdamaian di berbagai negara.

Keterlibatan LSM pada era globalisasi diharapkan mampu menembus tembok penghalang perdamaian. Sebabnya, LSM secara definisi, tidak mempunyai

kepentingan spesifik, seperti halnya negara dan partai politik, melainkan kepentingan utamanya adalah mengabdikan perdamaian dan menolak kekerasan.

Dengan kata lain, ingin mengatakan hendaknya peranan *Civil Society* lebih diberi tempat dalam mengatasi konflik tersebut. Tentu saja LSM yang mampu ikut memainkan peranan di wilayah bergolak semacam itu adalah LSM yang tumbuh dari bawah, dengan pengikut yang cukup besar dan menghargai kemajemukan, serta memiliki nilai-nilai keagamaan yang universal, seperti toleransi, keadilan dan prinsip “jalan tengah”. Atau tokoh-tokoh yang integritasnya telah teruji dalam mewujudkan perdamaian dan pencarian solusi konflik. []

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku;

- Abduh, Muhammad. “*Quranic Exegesis*”, (Tafsir al-Quran al-Hakim), Al-Manar 8, 24 (1906) in Moaddel and Talattof (2000).
- Abdul Malek, Mohd. Zamberi. “*Tuan Guru Haji Sulong: Gugusan Cahaya Patani*”, (Kuala Lumpur: Anjung Media Resources, 2015).
- Abdurrahman, Dudung. “*Pengantar Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Kumia Kalam Semesta, 2003).
- Abu Zayd, Nasr Hamid. “*Il-Imam al-Syafii, wa Ta’itsits al-Ideologiyyah al-Wasithah* (Kota terbit?: Egypt Madbuly, 1996).
- Ahmed, Istiaq. “*The Concept of an Islamic State*”, (London: Frances Pinter Publisher, 1987).
- Ahmadi, Komari. “*Perang dan Damai dalam Islam*”, (Bandung: Pustaka Setia, 1995).
- an-Naim, Abdullahi Ahmed. “*Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan, Syariah*”, (Bandung: Mizan, 2007).
- Algar, Hamid. “*Wahhabisme; Sebuah Tinjauan Kritis*”, (Oneonta, New York; Islamic Publication International, 2002).
- Al-Fatani, Ahmad Fathy. “*Ulama Besar dari Patani*”, (Kuala Lumpur; Universitas Kebangsaan Malaysia, 2001).
- Al-Mimmy, Hasan. “*Ahl Dhimmah fi al-Hadharaty al-Islamiyah*”, (Bairut, Dar al-Arab Al-Islamy, 1998).
- Al-Qaradawi, Yusuf. “*Fikah Minoriti Muslim*”, terj. Yusuf Sinaga, (Kuala Lumpur: Seribu Dinar, 2015).
- Al-Qaradawi, Yusuf. “*Fi Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslima: Hayat al-Muslimin Wasat al-Muitam’at al-Ukhro*”, (Cairo: Dar as-Suruq, 2001).
- Anderson, Benedict. “*Imagined Communities; Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*”, (Manila: Verso, 2004).
- Aphornsuvan, Thanet. “*Sejarah Kritik; Siam Thai dengan Patani*”, (Bangkok: Matichon, 2013).
- Askew, Marc. “*Legitimacy Crisis in Thailand*”, (Bangkok: King’s Prajadhipok’s Institute, 2010).
- Azra, Azrumardi. “*Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & VXIIP*”, (Jakarta; Kencana Pranada Media Grup, 2013).
- Azzam, Salem. et. al., “*Muslim Communities in Non-Muslim States*”, (London: Islamic Council of Europe, 1980).
- A.Malek, Mohd Zamberi. “*Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*”, (Shah Alam: HIZBI, 1993).

- A.Malek, Mohd. Zamberi. *“Harimau Malaya: Biografi Tengku Mahmood Mahyiddeen”*, (Bangi-Selangor : Universiti Kebangsaan Malaysia Press, 1999).
- Barter, Shane Joshua. *“Civilian Strategy in Civil War: Insights from Indonesia, Thailand, and the Philippines”*, (US Palgrave Macmillan, 2014).
- Benhabib, Seyla. *“Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Politic”*, (Princeton: Princeton University Press, 1996).
- Binci, Arifin. A. Lomen, dan Suhaimi Ismail, *“Patani Sejarah dalam Dunia Melayu”*, (Songkhla: Center of Southern Thai Islamic Culture, 2009).
- Bin Cik, Arifin. Dkk, *“Patani; Sejarah dan Politik dalam Dunia Melayu”*, (Songkhla: Yayasan Kebudayaan Islam Selatan, 2007).
- Bradley, Francis. *“Forging Islamic Power and Place: The Legacy of Shaykh Daud Bin 'Abd Allah Al-Fatani in Mecca and Southeast Asia”*, (USA: University of Hawai'i Press, 2015).
- Brown, Rajeswary Ampalavanar. *“Islam and the Muslims in Thailand: Faith, Philanthropy and Politics”*, (New York: Routledge, 2014).
- Chalk, Peter. *“Separatism and Southeast Asia: The Islamic Factor in Southeastern Thailand, Mindanao and Aceh,” Studies in Conflict & Terrorism* 24 (2001).
- Chapakia, Ahmad Omar, *“Politik Thai dan Masyarakat Islam di Selatan Thailand”*, (Kedah: Pustaka Darussalam, 2002).
- Chavan, R.S. *“Nationalism in Asia”*, (New Delhi, Safdarjang Enclave, 1973).
- Che Man, W.K. *“Muslim Separatism the Moros of Southern Philipines and the Malays of Southern Thailand”*, (Manila: Ateneo de Manila University Press, 1990).
- Cohen, Jean L. dan Arato, Andrew. *“Civil Society and Political Teori”*, (London: MIT Press, 1992).
- Connors, Michael Kelly. *“Democracy and National Identity in Thailand”*, (New York: Routledge, 2003).
- Cox, Robert W. *“Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay on Method,”* dalam James Martin, ed. *Gramsci, Antonio, Critical Assessments of Leading Political Philosopher*, Edited by (New York: Routledge, 2002).
- Daulay, Haidar Putra. *“Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Derek, Suthisak. Dkk, *“Advokasi Perundangan bagi Komunitas Lokal di Kawasan Provinsi Selatan”*, (Pattani: Institute Studi Islam PSU Pattani, 2011).
- Dongbangsthan, Bunkrom. *“Perjuangan Terakhir Chualit Yongchajud”*, (Bangkok: Ofset Press, 2005).
- Eminov, Ali. *“Turkish and Other Muslim Minorities of Bulgarian”*, (London: Hurst and Company in Association with the Islamic Council, 1997).
- Hajar, Ibnu. *“Dasar-dasar Penelitian dalam Pendidikan”*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996).

- Harding, Andrew. Leyland, Peter. *"The Constitutional System of Thailand: A Contextual Analysis"*, (UK: Hart Publishing, 2011).
- Hasan, Noorhaidi. *"Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori"*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012).
- Helbardt, Sascha. *"Deciphering Southern Thailand's Violence: Organization and Insurgent Practices of BRN-Coordinate"*, (Singapore: ISEAS Institute of Southeast Asian Studies-Yusof Ishak Institute, 2015).
- Hefner, Robert W. *"Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia"*, (UK: Princeton University Press, 2011).
- Heywood, Andrew. *"Political Ideologies: An Introduction"*, (UK: Palgrave Macmillan, 2001).
- Hidayat, Asep Achmad. *"Studi Kawasan Muslim Minoritas Asia Tenggara"*, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2014).
- Hikam, Muhammad AS. *"Demokrasi dan Civil Society"*, (Jakarta: LP3S, 1996).
- Hirji, Zulfikar. *"Debating Islam from Within: Muslim Constructions of the Internal Other,"* dalam Zulfikar Hirji, ed. *Diversity and Pluralism in Islam: Historical and Contemporary Discourses among Muslims* (New York, I.B. Tauris & Co. Ltd., 2010).
- Ishiyama, John T., Breuning, Marijke. editor. *"Ilmu Politik; Dalam Paradigma Abad Ke-21"*, Jilid II, (Jakarta: Pranada Media Group, 2013). Diterjemahkan oleh Tri Wibowo B.S, dari buku aslinya *"21st Century Political Science: A Reference Handbook"*.
- Jerryson, Michael K. *"Buddhist Fury: Religion and Violence in Southern Thailand"*, (New York: Oxford University Press, 2011).
- Johnathan H. Turner, Alexander Maryanski, *"Fungsionalisme"*, terj. Anwar Efendi, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Jory, Patrick *"Ghosts of the Past in Southern Thailand: Essays on the History and Historiography of Patani"*, (Singapore: NUS, 2013).
- Karni, Asrori S. *"Civil Society & Ummah"*, (Jakarta : Logos, 1999).
- Kettani, M. Ali. *"Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini"*, terj. Zarkowi Soejoeti (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
- Kurniawan, Luthfi J., Puspitosari, Hesti. *"Negara, Civil Society & Demokrasi"*, (Malang: Intrans Publishing, 2012).
- Kymlicka, Will. *"Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights"*, (Oxford: Oxford University Press, 1995).
- Lauridsen, Laurids S. *"The Policies and Politics of Industrial Upgrading in Thailand During the Thaksin Era"*, Bangkok, *the 10th International Conference On Thai Studies*, Thammasat University, November 2008.
- Liow, Joseph Chinyong. *"Islam, Education, and Reform in Southern Thailand: Tradition & Transformation"*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009).

- Madmarn, Hasan. *"The Pondok and Madrasah in Patani"*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia Press, 2002).
- Manger, Leif. ed. *"Muslim Diversity, Local Islam in Global Contexts"*, (Surrey Great Britain: Curzon Press, 1999).
- McCargo, Duncan. *"Mapping National Anxieties: Thailand's Southern Conflict"*, (Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies, 2012).
- McCargo, Duncan. *"Tearing Apart The Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand"*, (Singapura: NUS Press, 2009).
- McCargo, Duncan. & Pathmanand, Ukrist. *"The Thaksinization of Thailand"*, (Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies, 2005).
- Merry, Michael S., Milligan, Jeffrey Ayala. *"Citizenship, Identity, and Education in Muslim Communities: Essays on Attachment and Obligation"*, (USA: Palgrave Macmillan, 2010).
- Michael J. Montesano dan Patrick Jory, ed., *"Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula"*, (Singapura: NUS Press, 2008).
- Mokarapong, Thawatt. *"Sejarah Revolusi Thai"*, terj. Wan Azaham Wan Mohamad, (Kuala Lumpur: Mas'dah, 1987).
- Moleong, Lexy J. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Mutalib, Hussin. *"Islam dan Etnisitas Perspektif Melayu"*, (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Muzani, Saiful. *"Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara"*, (Jakarta: LP3ES, 1993).
- Myzara, *"Di Sebalik Rundingan Damai Hat Yai"*, (Selangor: ALAF 21, 2015).
- Nakamura, Mitsuo. Siddique, Sharon. Bajunid, Omar Farouk. *"Islam and Civil Society in Southeast Asia"*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001).
- Nik Mahmoud, Nik Anuar. *"Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954"*, (Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000), Edisi huruf Arab Jawi.
- Nurhasim, Moch. *"Konflik dan Intergrasi Politik"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008).
- Parekh, Bhikhu *"Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory"*, (London: Macmillan Press, 2000).
- Parsons, Talcott. *"The Structure of Sosial Action"*, (New York: McGram-Hill, 1937).
- Pathan, Don. *"Conflict Management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand's Deep South"*, (Bangkok: The Asia Foundation, 2012), (Bahasa Inggeris dan Thailand).
- Pathan, Muhammad Ayub. *"Arsip Laporan: Masyarakat Sipil dan Proses Perdamaian"*, (Pattani: Deep South Wacth, 2012).

- Pathan, Muhammad Ayub. dkk, “*Civil Society dalam Proses Perdamaian; Laporan Riset status kedudukan Organisasi Civil Society di Thailand Selatan*”, (Pattani: Deep South Watch, 2012), (Bahasa Thailand).
- Peleg, Ilan. “*Democratizing the Hegemonic State: Political Transformation in the Age of Identity*”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
- Pitsuwan, Surin. “*Islam di Muangthai; Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*”, terj. Hasan Basri, (Jakarta: LP3S, 1989).
- Poulton, Hugh and Suha Taji-Farouki, eds. “*Muslim Identity and the Balkan State*” (New York: New York University Press. 1997).
- Praserkul, Seksant. “*Politik Civil dalam Sistem Demokrasi*”, (Bangkok: Wiphasa Press, 2010).
- Rajan, Nalini. “*Democracy and the Limits of Minority Rights*”, (New Delhi-London: Sage Publications, 2002).
- Ramadon Panjor, “*PPP: Pa(t)tani Peace Process in ASEAN Context*”, (Pattani: deepbooks, 2013), (Bahasa Thailand).
- Reynold, Craig J. ed. “*National Identity and Its Defenders Thailand, 1939-1989*”, (Victoria: Center for Southeast Asian Studies Monash University, 1991).
- Ritzer, George. dan J. Goodman, Douglas. “*Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Saifuddin Azwar, “*Metode Penelitian*”, Cet II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Saravanamuttu, Johan. “*Islam and Politics in Southeast Asia*”, (New York: Routledge, 2010).
- Satha-Anand, Chaiwat. “*The Life of this World: Negotiated Muslims Lives in Thai Society*”, (New York: Cavendish Square Publishing, 2005).
- Schwarzmatel, John. “*Citizenship and Identity: Towards a New Republic*”, (New York: Routledge, 2003).
- Seymaour, Michel. “*Rethinking Political Recognition*”, dalam Gagnon, Alian-G and Gubernau, Montserrat, and Rocher, François, “*The Conditions of Diversity in Multinational Democracies*”, (Montreal: The Institute for Research and Public Policy (IRPP), 2003).
- Sidiq Ahmad, Surwandono. “*Resolusi Konflik Di Dunia Islam*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Simatupang, Mayjen. T.B “*Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai*”, (Jakarta: Sinaran Harapan, 1981).
- Smith, Anthony D. “*National Identity*”, (Nevada: Nevada University Press, 1991).
- Rosyada, Dede dkk. “*Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*”, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: Prenada Media, 2000).

- Strate, Shane. *"The Lost Territories: Thailand's History of National Humiliation"*, (USA: University of Hawai'i Press, 2015).
- Suaedy, Ahmad. *"Dinamika Muslim Mencari jalan Damai: Peran Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan"*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2012).
- Suwannathat-Pian, Kobkua. *"Kings, Country and Constitutions: Thailand's Political Development 1932-2000"*, (New York: Routledge, 2003).
- Tarling, Nicholas. ed. *"The Cambridge History of Southeast Asia"*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994).
- Thomas, M. Ladd. *"Political Violence in the Muslim Provinces of Southern Thailand"*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1975).
- Tuan Meange, Tuan Danial. *"Patani Merdeka Dijalan Raya"*, (Patani: Awan Book , 2013).
- Wolters, Willem. *"Muslim Rebel Movements in the Southern Philippines: Recruitment Are for al-Qaeda Terrorists?,"* Focaaal - European Journal of Anthropology 40 (2002).
- Yegar, Moshe. *"Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar"*, (Maryland: Lexington Books, 2002).

Jurnal;

- Al Fadl, Khaled Abou. *"Islamic Law and Muslim Minorities: The Juristic Discourse on Muslim Minorities from 8th to 17th Century CE / 2th to 11th Century Hijrah,"* Singapore, MUIS Occational Papers Series 2006.
- Appleby, R. Scott *"The Ambivalence of the Sacred, Religion, Violence, and Reconciliation"*, (New York: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2000)
- Aphornasuvan, Thanet. *"Nation-State and the Muslim Identity in the Southern Unrest and Violence,"* dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, eds. *Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand* (Bangkok: KAS, 2006).
- Arya, Gothom. *"Local Patriotism and the Need for Second Language and Education Policies in the Southern Border Provinces"*, dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, eds. *"Understanding Conflict Approaching Peace in Southern Thailand"*, (Bangkok: KAS, 2006).
- Askew, Marc. *"Conspiracy, Politics, and A Disorderly Border: The Struggle to Comprehend Insurgency in Thailand's Deep South,"* *Policy Studies* 29 (2007).
- Azra, Azyumardi. and Hudson, Wayne. *"Islam Beyond Conflict: Indonesian Islam and Western Political Theory"*, (Ashgate Publishing, Ltd., 2008).
- Biel, Eric. Neil Hicks and Michael McClintock (ed). *Losing Groun, "Human Rights Defenders and Counterterrorism in Thailand"*. Human Rights Defenders and Counterterrorism Series No. 4. A Human Rights First Report 2005.
- Brown, David. *"From Peripheral Communities to Ethnic Nations: Separatism in Southeast Asia"*, *Journal Pacific Affairs* Vol. 61, No. 1 Spring 1988. University of British Columbia.

- Butko, Thomas J. "Revelation or Revolution: A Gramscian Approach to the Rise of Political Islam," *British Journal of Middle Eastern Studies*, no. 31 (2004).
- Bueto, Usman. "Gerakan Pembebasan Muslim Melayu di Patani, Thailand Selatan (1973-1980)", dalam *Thaqafiyat; Jurnal Ilmu Budaya*. Volume 11, No 2, Juli-Desember 2010.
- Chalk, Peter. "The Malay-Muslim; Insurgency in Southern Thailand, Understanding the Conflicts Evolving Dynamic," (National Defence Research Institute, 2008).
- Che Man, Wan Kadir, "Muslim Separatism: The Moros of the Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand", (OUP, 1990), dalam ICG Asia Report N°98, op.cit. 2005.
- Che Man, Wan Kadir. "Perjuangan Pembebasan Bangsa Melayu Islam Patani Mejelang Tahun 2000", dalam "Minoriti Muslim; Cabaran dan Harapan Menjelang Abad ke 21", ed, Wan Kamal Mujani, (Bangi: UKM, 2002).
- Davis, Anthony. "Ethnic Divide Widens in Thailand", *Jane's Terrorism & Security Monitor*, 17 November 2004; figures compiled by Panitan Wattanakorn, political scientist at Chulalongkorn University, Bangkok di ICG Asia Report N°98, op.cit. "Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad", 18 Mei 2005.
- Esposito, John L. "Modernizing Islam and Re-Islamization in Global Perspective," dalam *Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in the Middle East and Europe*, oleh Esposito, J. L. & Fracois Burgot, eds., (New Jersey: Rutgers University Press 2003).
- Fishman, Shammai. "Fiqh Al-Aqalliyah: A Legal Theory for Muslim Minorities," *Research Monographs on the Muslim World* 1, no. 2 (2006).
- Funston, John. "Southern Thailand: The Dynamics of Conflict", (Washington D.C, East-West Center Washington-Policy Studies, 2008).
- Gramsci, Antonio. "State and Civil Society," dalam Arachana Shama and Akhil Gupta, eds. *The Antropology of the State: A Reader* (Victoria: Blackwell Publishing, 2006).
- Guan, Lee Hock. "Introduction: Civil Society in Southeast Asia," dalam Guan Hock Lee, ed. *Civil Coiety in Southeast Asia* (Singapura: ISEAS, 2004).
- Hanna, Willard A. "Paninsular Thailand: The Thai Muslim Centers of Pattani and Yala", *Reports Service* Bagian V, 1965.
- Hanum, Latifah. "Modernisasi Pendidikan Islam di Thailand", Volume 1 No. 1. Januari-Juni, 2013.
- Hikam, Muhammad AS. "Wacana Intelektual Tentang Civil Society di Indonesia", dalam *jurnal Paramadina*, vol.1, No.2, tahun 1999.
- ICG Asia Report N°100, "Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad", *International Crisis Group Asia*, op.cit. 18 Mei 2005.
- ICG Asia Report N°105, "Thailand's Emergency Decree: No Solution", *International Crisis Group Asia*, op.cit. 18 November 2005.

- ICG Asia Report N°241, “*Thailand: The Evolving Conflict in the South*”, International Crisis Group Asia, op.cit. 11 December 2012.
- Ismail, Nuh. “*Pusat Penyelarasan Tadika Selatan Thai (Perkasa) Dan Peranannya Dalam Mempertabatkan Bahasa Melayu, Di Selatan Thailand*”, *Journal Al-Muqaddimah; Journal of Postgraduate Studies In Islamic History and Civilization*, Volume 3(3), Desember, 2015.
- Jenne, Erin. “*A Bargaining Theory of Minority Demands: Explaining the Dog that Did not Bite in 1990s Yugoslavia*”, dalam *International Studies Quarterly* 48 (2004).
- Johnston, Hank, “*New Social Movements and Old Regional Nationalism*,” dalam Enrique Laraña et. al., ed. “*New Social Movements from Ideology to Identity*”, (Philadelphia: Temple University Press, 1994).
- Jory, Patrick. “*From “Patani Melayu” to “Thai Muslim”*”, Singapore : ISIM Review 18-Autuman 2016, 42-43.
- Khan, Sa’ad S. “*The Organization of the Islamic Conference (OIC) and Muslim Minority*,” *Journal of Muslim Minority Affairs* 22, no. 2 (2002).
- Klandermans, Bert. “*Transient Identities? Memberships Pattern in the Dutch Peace Movement*,” dalam Enrique Laraña et. al., ed. *New Social Movements from Ideology to Identity* (Philadelphia: Temple University Press, 1994).
- Laclau, Ernesto. “*Introduction*” dalam “*The Making of Political Identities*”, (New York: Verso, 1994).
- Liow, Joseph Chinyong, “*Muslim Resistance in Southern Thailand and Southern Philippines: Religion, Ideology, and Politics*,” *Policy Study* 24 (2006).
- Mat Zain, Farid. “*Sejarah Perkembangan Sistem Pengajian Pondok di Patani*”, dalam “*Minoriti Muslim; Cabaran dan Harapan Menjelang Abad ke 21*”, ed, Wan Kamal Mujani, (Bangi: UKM, 2002).
- Mazhar Siddiqi, Muhammad Yasin. “*The Prophet Muhammad SAW: A Role Model for Muslim Minorities*”, (Leicestershire: The Islamic Foundation 2006).
- McAuliffe, Jane Dammen. ed., “*Community and Society in the Qur’ân*” dalam *Encyclopaedia of the Qur’ân*, (Leiden: EJ. Brill, 2001), vol. 1.
- McCargo, Duncan D.J. (ed.) “*Rethinking Thailand's Southern Violence*”, (National University of Singapore Press, 2007).
- McCargo, Duncan. “*Autonomy for Southern Thailand: Thinking the Unthinkable?*” *Pacific Affairs*, 18 (2) (2010).
- McCargo, Duncan. “*Thailand’s National Reconciliation Commission: a flawed response to the Southern Conflict*”, *Global Change, Peace and Security*, 22, 1, February 2010.
- Meadwell, Hudson. “*Forms of Cultural Mobilization in Québec and Brittany, 1870-1914*,” *Comparative Politics* 15, no. 4 (July 1983).
- Miichi. Ken, and Farouk, Omar. “*Southeast Asian Muslims in the Era of Globalization*”, (International Relations & Development Collection 2015).

- Moussalli, Ahmad. "Modern Islamic Fundamentalist Discourses on Civil Society, Pluralism and Democracy," in Augustus Richard Norton (ed.), *Civil Society in the Middle East, Vol. 1*, (Leiden and New York: E, J. Brill, 1995).
- Mujani, Wan Kamal. ed, "Minoriti Muslim; Cabaran dan Harapan Menjelang Abad ke 21", (Bangi: UKM, 2002).
- Mujani, Wan Kamal. "Minoriti Muslim di Balkan; Krisis dan Konflik Bosnia-Hercegovina", dalam "Minoriti Muslim; Cabaran dan Harapan Menjelang Abad ke 21", ed, Wan Kamal Mujani, (Bangi: UKM, 2002).
- Nik Mahmud, Nik Anuar. "Tengku Mahmud Mahyideen, British dan Isu Percantuman Patani dengan Tanah Melayu", dalam "Minoriti Muslim; Cabaran dan Harapan Menjelang Abad ke 21", ed, Wan Kamal Mujani, (Bangi: UKM, 2002).
- Pathmanand, Ukrist. "Thaksin's Policies Go South," *Far Eastern Economic Review* 168, no. 7 (2005).
- Pathmanand, Ukrist. "Thaksin's Achilles' Hell: The Failure of Hawkish Approaches in the Thai South", dalam Duncan McCargo, *Rethinking Thailand's Southern Violence* (Singapura: NUS, 2007).
- Poulton, Hugh. "The Muslim Experience in the Balkan State, 1919-1991," (*Association for the Study of Nationalities*, Nationalist Papers, Vol. 28, no. 1, 2000).
- , *Report of the National Reconciliation Commission (NRC)*, "Overcoming Violence Through the Power of Reconciliation", 16 May 2006.
- Rahardjo, M. Dawam. "Masyarakat Madani di Indonesia, Sebuah Penajakan Awal", dalam jurnal Paramadina, vol 1, no 2. 1999.
- Saeed, Abdullah. "Rethinking Citizenship Rights of Non-Muslim in an Islamic State: Rashid al-Ghannûshi's Contribution to the Evolving Debate", dalam *Jurnal Islam and Christian-Muslim Relation*, Vol. 10. No. 3 (1999).
- Satha-Anand, Chaiwat. ed, *Imagined Land? The State and the Southern Violence in Thailand*, Bangkok: Research for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA) 2009.
- Schak, David C. and Hudson, Wayne. "Civil Society in Asia", (Ashgate University of Michigan, 2003).
- Setea, Abdulghani. "Role of Civil Society and the Future of Islamic Civil Society in Solving the Southern Border Provinces", *Jurnal Perspektif Asia* oleh Institute Studi Asean di Universitas Chulalongkorn Bangkok, 2011. (1 Dekade Konflik Patani, [edisi 2 tahun 34 Juli-Desember 2011] hlm. 93-137, (Bahasa Thailand).
- Suaedy, Ahmad. "The Minority Movement in Southmost Thailand: From the Periphery to the Centre," *Studia Islamica* 17, no. 1 (2010).
- Suaedy, Ahmad. "The Minority Struggle under a Hegemonic State: A Case Study of the Bangsamoro Muslims of the Southern Philippines," *Southeast Asian Journal*, CSEAS, Kyoto University, 2001.
- , The King Prajadhipok's Institute (KPI), "Dialogue on Implementing the Local Government Provisions of the New Constitution in Thailand," Januari 2007.

Thomas, M. Ladd. *“Political Violence in the Muslim Provinces of Southern Thailand”*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1975).

-----, *United Nations Minorities Declaration* yang diadopsi Majelis Umum PBB tahun 1992.

Upward, Jeff. *“Insurgency in Southern Thailand: The Cause of Conflict and the Perception of Threat,”* November 2006.

Rujukan Berupa Sumber tidak di Terbitkan;

O-in, Apichaya. *“Partnership of International Funding Agencies and Civil Society Organizations in Peacess Process in Southern Border Provinces of Thailand”*, (Bangkok: Chulalongkorn University, 2012).

Panjor, Romadon. *“Politics of Words in Pa(t)tani: Constructing “Peace” in Ethnopolitical Conflict”*, in *Thesis for Master of Arts (Political Science)*, (Bangkok: Thammasat University, 2015), Bahasa Thailand.

Arsip dan Dokumentasi;

Angkhana Neelapaijit; Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Diambil pada tanggal 20 Desember 2015.

Brosur; Yayasan Nusantara dan *“Majalah Peduli Anak Yatim”*. Diambil pada 13 Februari 2015.

Buletin; Forum PERMATAMAS *“Dialog Publik”* di Kampung Kuala Pradu, Kecamatan Pakbang, Kabupaten Thepa, Provinsi Songkhla. Pada tanggal 4 Oktober 2016. Dan diambil pada tanggal 19 Mei 2016.

Buletin; LEMPAR. Diambil pada tanggal 12 April 2015.

Buletin; PerMAS 2015 *“The Right of Self-Determination of Patani”* (RSD PATANI). Diambil pada tanggal 21 Mei 2016.

Buletin; PERWANI. Diambil pada tanggal 20 Mei 2016.

Dokumentasi; *“Darul Maarif Institute History”*, Buku Panduan 2014. Diambil pada 20 Februari 2016.

Dokumentasi; *Malay-Patani Civil Society Network for Peace*. Diambil pada tanggal 10 Desember 2015.

Dokumentasi; *Muslim Attorney Center Foundation-MAC*. Diambil pada tanggal 27 Mei 2016.

Laporan; Greenpeace Thailand. Diambil pada 17 Februari 2016.

Laporan; *“Kondisi Hak Asasi Manusia Seluruh Dunia”*, Laporan Tahunan Amnesty International Thailand 2014-2015.

Laporan; PERMATAMAS. Diambil pada 7 Juni 2016.

Torture Report; “Situasi Penyiksaan tidak Manusiawi, Kejam, dan Perlakuan Merendahkan di Provinsi Wilayah Selatan Perbatasan 2014-2015” atau (*Torture Situation and Inhumane, Cruel and Degrading Treatments in Southern Bordering provinces in 2014-2015*). Dikelur oleh kelompok Duay Jai (*Hearty Support Group’s*), Yayasan Lintas Budaya (*Cross Cultural Foundation-CrCF*), dan Jaringan Organisasi Hak Asasi Manusia Patani-HAP.

Surat Terbuka; “*Deklarasi Takbai 2015*” oleh PerMAS. Diambil pada tanggal 21 Mei 2016.

Internet Situs Online;

Ahlubait Academic Thailand, [www.ahlulbait.org]

Bangkok Post [www.bangkokpost.com].

BBC [www.bbc.com].

Bernamea, [www.bernama.com]

CNN, [edition.cnn.com].

Deep South Watch, [www.deepsouthwatch.org]

DW, [www.dw.com].

Fatoni Online, [www.fatonionline.com]

Hidayatullah, [www.hidayatullah.com]

Human Rights First [www.humanrightsfirst.org].

Institute Islam Thai, [www.institusiislamthai.wordpress.com]

Isra News, [www.isranews.org]

Koperasi Islam Pattani Berhad, [www.iscop.co.th]

Matichon Online, [www.matichon.co.th]

Media Selatan, [www.mediaselatan.com]

Patani Forum, [www.pataniforum.com]

Patani Post [www.patanipost.net].

People’s College of Patani, [www.peoplecollegeofpatani.org]

PETIDAM, [www.petidam.blogspot.co.id]

PERKASA, [www.perkasa.pnyss.wonderpress.com]

Politico, [www.politico.ie].

Prachatai, [www.prachatai.com]

Republika, [www.republika.co.id]

Syarikat Takaful Ibnu Affan Berhad, [www.ibnuaffan.com]

Telegraph [www.telegraph.co.uk].

Thai Muslim, [www.thaimuslim.com]

The Diplomat [www.thediplomat.com].

Utusan Melayu, [www.utusan.com.my]

Wartani, [www.wartani.com]

Washington Times, [washingtontimes.com]

Wawancara;

Abdul Muhaimin Soleh, ketua Yayasan Pusat Penyelarasan Tadika Selatan Thai (PERKASA).

Abdullah Wanahmad, Wakil Ketua Awan Book.

Abdulqahar Aweaputeh, Direktur *Muslim Attorney Centre Foundation* (MAC) Patani.

Abdulrahman Dewani, senior jurnalis dan anggota Dewan Bahasa dan Pustaka Melayu Thailand (DBPMT).

Abdulsalam Sa-i, mantan Sekretaris Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani (PerMAS).

Abdulwahab Prasithima, Pekerjaan Petani Karet juga warga Kuala.

Adilan Ali Ishak, Direktur *Muslim Attorney Centre Foundation* (MAC) Yala.

Aiyub Musek, Aktivis PERMATAMAS.

Aiyub Chena, Wakil Direktur Yayasan Nusantara Untuk Kebajikan Anak Yatim Patani.

Aladee Dengnik, Direktur Yayasan Nusantara Untuk Kebajikan Anak Yatim Patani.

Aladeen Zakariya, Wakil Ketua Persatuan Silat Harimau Patani (PerSHaP).

Amri, aktivis Pusat Budaya Melayu Patani (BUMI).

Anchana Heemmina, ketua kelompok Duay Jai (*Hearty Support Group's*).

Arafan Watthana, mantan Direktur Advokasi Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani (PerMAS).

Areef Sahok, Aktivis *Southern Paralegal Advocacy Network* (SPAN) Patani.

Arifen Soh, Presiden Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani (PerMAS).

Arifin Bin Cik, ketua Yayasan Kebudayaan Islam Selatan Thai (YAKIST).

Asmadi Beraheng, Sekjen Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani (PerMAS).

Awae Narong, Ketua Umum *South Free Art Group*.

Azmi, aktivis Persatuan Seni Khat Anak Fathoni (PESKHAF).

Azmi Kalupe, Aktivis *Public Health officer for Social Welfare* (PHOS).

Azmi Puk, Ketua Jaringan Belia Lembangan Sungai Teluban (JALEM).

Azha Doloh, Koordinator Jaringan Intelektual Patani (INSouth).

Baba Haji Hasan Ghazali, pengasas pondok Tajuttalibin di Bachok Narathiwat.

Chaiwat Satha-Anand, peneliti senior tentang perdamaian di Thailand Selatan dari Universitas Thammasat, Bangkok.

Chareef Saed, Sekjen Jaringan Intelektual Patani (INSouth).

Direk Hemnakorn, Ketua Koordinator PERMATAMAS.

Farid Zain, Dosen Peneliti Sejarah Patani di Universitas Kebangsaan Malaysia.

Hara Shintaro, Ahli Bahasa Melayu asal Jepang dan mantan dosen bahasa Melayu di PSU Pattani.

Hambali Hamat, Pengurus Persatuan Ikatan Jejak Warisan Nusantara Kelantan.

Hasan Yamimudi, Ketua Bunga Raya Group untuk Pendidikan (BRG).

Hirmi Abdulrohman Jeamae, Aktivis *Southern Paralegal Advocacy Network* (SPAN) Yala.

Husni Ibrahim, Ketua Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam (PUKIS).

Humaidee Benjasmith, anggota Pusat Pemulihan Seni Budaya Tempatan dan Alam Sekitar Wilayah Sempadan Selatan Thailand (PUSTA).

Ibrahim Ali, pekerjaan Nelayan warga asal Datok, Telok Kapor, Yaring, Pattani.

Ihsan Sama, Mahasiswa Universitas Fatoni dan juga selaku Koordinator PERMATAMAS.

Ismael Teh, Presiden Jaringan Hak Asasi Prikemanusiaan Patani (HAP).

Ismail Ishaq Benjasmith, Sejarahwan dan ketua Pusat Pemulihan Seni Budaya Tempatan dan Alam Sekitar Wilayah Sempadan Selatan Thailand (PUSTA).

Ismail Nesea, Direktur *People College* (PC).

Ismail Wancik, Pimpinan Redaktur Wartani.

Jareeyah Yusof, koordinator Mutiara salah satu organisasi sayap PerMAS.

Je Useng Bin Wahab, Pekerjaan Nelayan warga Kuala.

Jehabdulloh Jehsorhoh Pemilik *Galellry Arts Patani*.

Khadun Palare, perwakilan Jaringan Mahasiswa PSU Untuk Keadilan dan sebagai Presiden Komunitas Konservasi Alam PSU Pattani.

Khoiruddin Idris, Ketua Pusat Budaya Melayu Patani (BUMI).

Ku Majdi Jamirudin, Presiden Persatuan Warisan Sri Patani (PEWANI).

Lutfee, Ketua Persatuan Seni Khat Anak Fathoni (PESKHAF).

Muhammad Deuramea, Direktur Sinaran.

Muhammad Fauzi, Aktivis *Southern Paralegal Advocacy Network* (SPAN) Narathiwat.

Muhammad Salim, Aktivis Bunga Raya Group untuk Pendidikan (BRG).

Muhammad Toyib, Ketua kelompok Art Melayu.

Mukhtar, Aktivis Bunga Raya Group untuk Pendidikan (BRG).

Musa Ahmad, petugas di “Bintang Resort” juga warga asal Datok, Telok Kapor, Yaring, Pattani.

Mustasikin Waba, Koordinator PERMATAMAS bagian Informasi.

Najib Ahmad, ketua Grup Arsitektur Patani, asal Jabat Narathiwat.

Nik Amin Nik Ahmad, Pemilik Muzium Khunlahan.

Sabri Ahmad, Ketua Persatuan Silat Harimau Patani (PerSHaP).

Seman Dosomi, Pemilik Muzium.

Sigree Mamak, Wakil Kelompok Arsitektur Patani.

Solar Garia, Ketua Awan Book.

Suhaimee, aktivis Pusat Budaya Melayu Patani (BUMI).

Suhaimee Dulasa, mantan Presiden Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani (PerMAS).

Sulaiman Chemaee, Peneliti Arsitektor Selindung Bayu.

Supat Hasuwannakit, Aktivis PERMATAMAS bagian Akademik. Dan juga Kepala Rumah Sakit Kabupaten Thapa provinsi Songkhla.

Suraida Waba, Ketua Persatuan Perempuan Patani (PERWANI).

Tuan Danial Tuan Meange, Direktur Lembaga Patani Raya untuk Kedamaian dan Pembangunan (LEMPAR).

Tuan Guru Dato' Seri H. Abdul Hadi Awang, Presiden PAS seketika seminar "*Political Development; Democracy and Islamic Party in Malaysia*". Di gelarkan oleh *Institute Southeast Asian Islam* (ISAI) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ustaz Lutfee H. Samae, pengurus Musium Manuskrip Kitab-kitab Ulama Nusantara dan pimpinan Madrasah Ahmadiyah Islamiah di Sala Anak Ayam.

Waehama Waekuejik, Direktur Media Selatan.

Wan Ali Musa, Koordinator *Youth Integration For Community Empowerment Center* (YICE).

Wanfais Waekuejik, anggota Media Selatan.

Zahri Ishak, Redaksi Wartani.

Zakariya Amataya, Sastrawan ahli puisi Melayu asal Narathiwat.

Dan sebagian informan yang keberatan disebutkan nama atas kesepatan awalnya dengan peneliti maka kepastian akan melindungi nama-namanya, dengan sebab soal keselamatan diskriminasi politik berjumlah sekitar 30-an orang. Adapun informan yang ditinggal di Patani maupun warga asal Patani diluar negeri seperti Malaysia, Brunie, Australia dan mahasiswa Patani yang kuliah di Indonesia.